

**RISET NAGARA INSTITUTE:
DINASTI POLITIK
DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH
TAHUN 2020**



MEMBANGUN PEMIKIRAN, MENCAPAI KEADILAN

RISET NAGARA INSTITUTE: DINASTI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

Tim Peneliti:

Dini Nur Fadhillah
Febriansyah Ramadhan
Teguh Triesna Dewa

Desain Grafis:

Dandy Hakim Pradana

Expert Review:

Yoes C. Kenawas
Goris Sahdan

Dewan Kurator

Dr. Mulyadi Tadampali, S. Sos, M.Si.
Sulfikar Amir, Ph.D
Zuhairi Misrawi

Direktur Eksekutif:

Dr. Akbar Faizal, M.Si.

NAGARA INSTITUTE, JAKARTA

Jalan Dukuh Patra Nomor 57, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.

Email: riset@nagarainstitute.com

Oktober, 2020.

DAFTAR ISI

1. <i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	3
2. PENGANTAR	5
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	8
a. Pelaksanaan pilkada 2020	
b. Calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan/dinasti politik dengan pejabat publik atau elit partai politik	
c. Jumlah calon kepala daerah/wakil yang bukan kader partai pengusung	
4. PENUTUP	30

DAFTAR DIAGRAM

1. DIAGRAM 1: Calon Kepala Daerah / Calon Wakil Kepala Daerah berdasarkan gender
2. DIAGRAM 2: Perkembangan Dinasti Politik Dari Tahun Ke Tahun
3. DIAGRAM 3: Sebaran Dinasti Politik dalam Pilkada Berdasarkan Jabatan
4. DIAGRAM 4: Calon Kepala Daerah / Calon Wakil Kepala Daerah Dinasti Politik berdasarkan Petahana dan Pendetang Baru.
5. DIAGRAM 5: Calon Kepala Daerah / Calon Wakil Kepala Daerah Dinasti Politik berdasarkan gender
6. DIAGRAM 6: Persentase Partai Politik Pengusung Dinasti Politik
7. DIAGRAM 7: Sebaran Dinasti Politik di Seluruh Indonesia Dalam Pilkada 2020
8. Diagram 8: Kepala Daerah yang Bukan dari kader partai politik pengusung
9. DIAGRAM 9: Partai Politik yang Tidak Mengusung Kadernya dalam Pilkada 2020

DAFTAR GAMBAR

Sebaran Dinasti Politik Di Seluruh Indonsia Dalam Pilkada 2020

DAFTAR TABEL

Istri kepala daerah yang maju dalam pilkada 2020

Executive Summary
**RISET NAGARA INSTITUTE TENTANG DINASTI POLITIK DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak episode ke-4 akan kembali digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Kita sebagai warga negara berhak untuk memahami bagaimana proses-proses konstitusional tersebut berjalan berikut berbagai masalah yang muncul dalam suksesi kepemimpinan formal di tingkat lokal serta kaitannya dengan pemerintahan lokal di masa lalu. Riset ini bermanfaat sebagai pembelajaran politik sekaligus modal pemilih dalam menjatuhkan pilihannya pada pilkada mendatang demi masa depan pemerintahan daerah.
- Pilkada serentak 2020 masih merawat masalah yang sama dari pilkada sebelumnya yakni pragmatisme partai politik dalam rekrutmen yang akhirnya menyuburkan dinasti politik di tingkat lokal. Temuan Nagara Institute menunjukkan terdapat 124 kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik dan maju sebagai calon kepala daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ 57 calon bupati dan 30 calon wakil bupati,
 - ✓ 20 calon walikota dan 8 calon wakil walikota,
 - ✓ 5 calon gubernur dan 4 calon wakil gubernur.
- Jika diklasifikasikan berdasarkan gender, terdapat 67 laki-laki dan 57 perempuan kandidat. Dari 57 kandidat perempuan, terdapat 29 diantaranya adalah istri kepala daerah sebelumnya.
- Sebaran calon pemimpin lokal ini berbasiskan dinasti politik ini hampir merata di 270 daerah pemilihan, baik pada tingkat provinsi, Kabupaten dan kota. Dan, Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah dengan jumlah kandidat dinasti politik terbanyak yakni 12 orang kandidat (1 kota dan 4 kabupaten). Disusul Sulawesi Utara yakni 11 orang kandidat yang tersebar di 1 pemilihan provinsi, 4 kabupaten dan 3 kota. Daerah rawan dinasti politik terbesar ketiga dan keempat ada di Pulau Jawa yakni Jawa Tengah (10 orang yang tersebar di 7 daerah pemilihan kabupaten dan 2 kota). Selanjutnya Jawa Timur dengan 9 orang yang tersebar di 7 kabupaten dan 2 kota. Selain daerah tersebut, dinasti politik juga tersebar di beberapa daerah lainnya.
- Berdasarkan status kandidat sebagai petahana atau pendatang baru, terdapat 22 petahana merupakan anggota dinasti politik di 13 kabupaten, 2 provinsi dan 4 wilayah pemerintahan Kota. Sisanya, sebanyak 102 kandidat dinasti politik adalah calon kepala daerah pendatang baru.
- Jika dilihat berdasarkan partai pengusung, Partai Golkar adalah partai politik terbanyak yang mengusung dinasti politik, disusul oleh PDIP dan Partai NASDEM.
- Temuan Nagara Institute selanjutnya adalah kenaikan jumlah dinasti politik ini disebabkan salah satunya oleh Putusan MK 33/PUU-XIII/2015. Sebelum putusan tersebut, jumlah dinasti politik pada rentang waktu 2005-2014 hanya di 59 wilayah pemerintahan. Namun pada 3 (tiga) pilkada serentak yakni tahun 2015, 2017 dan 2018

terjadi kenaikan drastis dengan total 86 orang kandidat. Jumlah ini meledak menjadi 124 kandidat pada Pilkada 2020 Desember mendatang.

- Kesimpulan dari riset Nagara Institute kali ini, Pilkada 2020 masih berkutut dengan pola masalah yang sama dari pilkada sebelumnya. Fungsi rekrutmen partai politik masih jauh dari harapan. Partai politik kembali gagal menjadi laboratorium yang menyiapkan calon pimpinan daerah yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi yang agung. Pragmatisme partai politik masih ditunjukkan dengan merekrut orang-orang yang bukan kader partai dan bermodal besar atau semata populis tanpa kemampuan manajerial pemerintahan. Fungsi rekrutmen yang kalang-kabut secara pasti menyuburkan dinasti politik yang masih menjadi masalah dalam demokratisasi di tingkat lokal.
- Melihat perjalanan pilkada sejak tahun 2005, kepala daerah yang berasal dari dinasti politik mengalami peningkatan yang signifikan. Terlebih setelah Putusan MK 33/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa praktik dinasti politik adalah konstitusional. Putusan ini menegaskan realitas dinasti politik yang tidak saja menjadi masalah demokrasi lokal, melainkan juga menjadi problem demokrasi pada skala yang lebih besar. Destruksi dari praktik dinasti politik tidak hanya merusak sendi demokrasi melainkan juga menghambat terwujudnya good governance dan mempengaruhi pembangunan ekonomi di tingkat lokal.
- Nagara Institute memiliki dua rekomendasi:
 1. Menutup rapat secara tegas pilihan calon kepala daerah yang terpapar dinasti politik.
 2. Para pembentuk undang-undang harus segera merevisi UU Partai Politik, khususnya mengenai kaderisasi partai politik yang mengharuskan seorang calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik telah berproses menjadi kader partai sekurang-kurangnya selama (5) tahun.

I. PENGANTAR

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 adalah pilkada serentak keempat di Indonesia. Sebagai sarana suksesi kekuasaan, pilkada yang diselenggarakan secara langsung adalah perangkat baru dalam demokrasi Indonesia yang dimulai pertama kali pada bulan Juni tahun 2005. Dalam 15 (lima belas) tahun perjalanannya, pilkada dihadapkan berbagai tantangan yang harus diselesaikan agar cita-cita mencapai demokrasi substantif tercapai. Pilkada yang sukses diharapkan menjadi sarana suksesi kekuasaan yang menghasilkan pejabat berkualitas yang mampu memenuhi harapan rakyat. Jika gagal dalam menyelesaikan tantangan yang ada, maka resistensi terhadap demokrasi berpotensi kian memburuk dan perjuangan menghidupkan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan reformasi menjadi sia-sia.

Tantangan pada pilkada serentak 2020 masih terbentur pada pola yang sama. Tak ada tanda perubahan dari partai politik untuk melakukan pembenahan mekanisme rekrutmen politik secara demokratis. Banyak kader-kader militan partai yang tersisihkan oleh calon non-kader partai dan hanya bermodalkan kapital besar atau memiliki hubungan kekerabatan/kekeluargaan dengan patron tertentu yang juga adalah elit partai. Akibatnya terjadi dramatisasi kader partai yang *walkout* dari partai politik karena kecewa oleh keputusan elit partai.

Mesin partai politik juga belum berfungsi menjalankan rekrutmen yang ideal berbasis pada kaderisasi dan ideologi partai. Ditambah lagi, peran negara melalui produk hukum belum juga berhasil memberikan tekanan dan komando yang jelas dan konkrit pada partai politik untuk melakukan hal yang ideal dalam ranah rekrutmen politik. Akhirnya, partai politik seperti berlomba-lomba menunjukkan paling demokratis dalam menjalankan rekrutmen, meskipun kenyataannya jauh panggang dari api. Bungkusnya demokratis, namun substansinya sangat elitis dan pragmatis. Hal itu terjadi juga pada 3 pilkada serentak sebelumnya, yakni 2015, 2017 dan 2018 (vide riset Nagara Institute: Agustus 2020).

Tantangan lain datang dari akses negatif otonomi daerah yang melahirkan raja-raja kecil, dimana pemerintahan daerah dikuasai oleh keluarga tertentu/dinasti politik yang memiliki penyebaran yang merata hampir di seluruh tanah air. Dinasti politik kian menambah masalah dalam sirkulasi elit karena tersumbatnya partisipasi politik disebabkan dominasi kuasa segelintir kelompok tertentu. Padahal sirkulasi elite adalah hal penting. Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca (1960) menegaskan bahwa sirkulasi elite akan melahirkan para pemimpin baru yang menduduki struktur dan organisasi baru. Sirkulasi politik menjadi kontrol bagaimana sebuah kekuasaan dijalankan. Sirkulasi elite yang sehat dibutuhkan, karena Pareto begitu percaya bahwa tidak ada elit yang mau menyerahkan kekuasaannya secara sukarela kepada elit yang lain, walau elit tersebut sudah mencapai tahap membusuk. Tidak berlebihan, jika sirkulasi elite disebut sebagai sarana “*me-refresh* kepemimpinan pemerintahan daerah”.

Sayangnya pertahanan kekuasaan yang dilakukan dinasti politik menjadikan sirkulasi elite tidak berjalan dengan baik. Kekuasaan hanya berpindah dari satu tangan

ke tangan lainnya dalam satu keluarga melalui suksesi kekuasaan/pilkada. Hal ini berujung pada dampak yang destruktif dari dinasti politik mulai dari penyalahgunaan kewenangan untuk melanggengkan kepentingan keluarga, melakukan tindak pidana korupsi hingga maraknya nepotisme dalam setiap bentuk kebijakan. Lebih lanjut, praktek politik dinasti ini ditunjukkan secara vulgar tanpa ada hambatan berarti, hingga akhirnya publik dihadapkan pada pilihan pasokan elit yang terbatas. Masalah-masalah ini tentunya menjadi tantangan khusus bagi demokrasi lokal, yang juga akan menurunkan kualitas demokrasi di tingkat nasional jika tidak segera diselesaikan.

Brian C Smith (1998) memberi catatan penting, bahwa demokrasi di daerah merupakan prasyarat bagi munculnya demokrasi di tingkat nasional. Asumsi ini berangkat bahwa ketika ada perbaikan kualitas demokrasi di daerah, secara otomatis bisa diartikan adanya perbaikan kualitas demokrasi di tingkat nasional. Beberapa alasannya antara lain demokrasi pemerintahan di daerah merupakan suatu ajang pendidikan politik yang relevan bagi warga negara di dalam suatu masyarakat yang demokratis. Artinya, terdapat unsur *proximity* bahwa pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat ketika proses demokratisasi berlangsung. Pilkada juga merupakan ruang bagi *developing democracy* (Diamond:2003) yang mencakup penguatan masyarakat publik (*political society*), penguatan masyarakat ekonomi (*economic society*) dan penguatan masyarakat budaya (*cultural society*). Pembangunan demokrasi juga mencakup penguatan dan *engagement* masyarakat sipil (*voice, access and control*), birokrasi yang netral, profesional dan *usable*, penguatan *rule of law*, serta institusionalisasi ekonomi dan politik.

Pembangunan demokrasi di tingkat lokal melalui pilkada bermuara pada cita-cita terbentuknya *local good governance*, yang menurut Goran Hayden (1992), ditunjang oleh dimensi aktor. Pada dimensi aktor, pilkada hendak menekankan pentingnya kekuasaan, kewenangan, resiprositas antara rakyat dan pemimpin serta pergantian kekuasaan. Dengan pilkada maka tidak ada lagi kekuasaan yang terpusat dan tersentral di tangan segelintir orang dan kekuasaan yang diperoleh memiliki legitimasi yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pilkada langsung yang sudah dilakukan sejak tahun 2005 hingga hari ini masih jauh dari harapan. Mulai dari penyelenggaraan yang jauh dari asas-asas pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia dan adil, politik uang yang masih merajalela, desain pilkada yang masih bongkar pasang, penyelesaian sengketa hasil yang hingga hari ini masih belum direalisasikan dalam peradilan khusus, hingga ikhwal kualitas calon kepala daerah yang tidak tersaring dengan baik dalam rekrutmen politik. Masalah-masalah itu tersusun dalam satu komponen yang berkorelasi dengan kualitas pemerintahan daerah, karena kualitas pemerintahan daerah sangat besar dipengaruhi dari proses kandidasi kepala daerah apakah menggunakan cara-cara yang baik dan proses pilkada yang dilakukan dengan jujur dan adil. Riset yang dilakukan Nagara Institute ini akan mengambil fokus pada dua isu yang merupakan jantung permasalahan, yakni mengenai rekrutmen partai politik dan dinasti politik.

II. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Proses pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data meliputi analisis dan interpretasi data. Karakteristik pendekatan kualitatif yang dipilih sesuai dengan Sugiyono (2014) yaitu bersifat deskriptif. Metode deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk memberikan fakta-fakta dan ciri-ciri bidang yang menjadi sasaran penelitian yaitu dinasti politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk dinasti politik, menganalisis calon kepala daerah yang terindikasi dinasti politik.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah berita online terkait pemilihan kepala daerah di Indonesia yang berskala daerah, sebagai berikut: *Martabe Sumut, Siaga Online, Obor Keadilan, Metro 24 Jam, Gatra, Pelita Batak, Suara Sumut Online, Metro Kampung, Bidik Nasional, Mimbar Rakyat, Sumut 24, Medan Bisnis Daily, Analisa Publik, Antara Sumut, Media Apa Kabar, Tribun Medan, Harian Fikiran Sumut, Sinar Baru Indonesia, Fase Berita, Media Lintas Indonesia, Media Sumutku, I News Sumut, Medan Pos Online, Sorot News, Durasi News, Perjuangan Sumut, Green Berita, Radar Pos Nasional, Garuda Nusantara, Tagar, Heta News, Muda News, Sipayo, Warta Pos Group Sumut, Semarak News, Metro Batam, Dimensi News, Koran Metro 7, Berita Huta, Suha News, Fajar, Langgam, Klik Positif, Pos Metro Padang, Jarbat News, Jurnal Sumbar, Harian Singgalang, Golkar Pedia, Harian Haluan, Top Sumbar, Nusa Bali, IDN Times Banten, Curup Ekspres, Pedoman Bengkulu, Analisa News, Suara Jogja, Pidjar, Jatim Times, Pojok 6, Metro Jambi, Jambi One, Halo Jambi, Bandung Pojok Satu, Tribun Cirebon, Radar Kudus, Republik Merdeka Online Jateng, Info Plus, Tribun Jogja, Banyumas Ekspres, Tribun Banyumas, Suara Merdeka Solo, Ngopi Bareng, Tribun Madura, Jatim Pos, Tribun Surabaya, Tribun Pontianak, Radar Banjarmasin, Kalimantan Pos, Bebas Baru, Borneo News, Tabengan Online, Tribun Kaltim, Selasar, Koran Kaltim, Kaltara Bicara, Koran Kaltara, Fokus Borneo, Tribun Bangka, Babel Pos, Wow Babel, Trawang News, Batam News, Antara News Kepri, Lampung Pos, Haluan Lampung, Sinar Lampung, Lampung Pos, Lampung Pro, Harian Momentum, Lampung Rilis, Kabar Timur News, Lentera Inspiratif, Tanda Seru, Pos Kota Maluku Utara, Kahaba, Dompu Bicara, Koran Lensa Pos, Lombok Pos, Garuda News, Duta Selaparang, Harian Nusa, Rakyat NTT, Tribun Kupang, Riau Pos, Mitra Pol, Hebat Riau, Spirit Riau, Pare Pos, Tribun Makassar, Mata Lensa, Saudagar News, Kabar Daerah Sulawesi Barat, Mata Kita, Berita Kota Makassar, Rakyat Sulsel, Jurnal Palopo, Antara News Sulteng, Sulteng Terkini, Wartakini, Berita Kota Kendari, Detik Bhayangkara, Manado Pos, Tribun Manado, I News Sulut, Berita Manado, Mata-Mata Politik, Sumsel Update, Tribun Sumsel, dan Media Sumutku. Dan berita pemilihan kepala daerah pada kabar berita online yang berskala nasional *Republika, Detik News, Sindo News, Okezone News, Harian Indonesia, Liputan 6, Merdeka, Berita Satu, Kompas, IMC News, Times Indonesia, CNN Indonesia, Tempo, Tirto ID, Antara News, Kumparan, Sindonews, Nusantara Pos*. Seratus lima puluh sembilan berita online tersebut peneliti pilih*

sebagai sumber data penelitian karena menyajikan berita terkait pemilihan kepala daerah dan calon kepala daerah yang terpapar dinasti. Berita *online* yang menjadi bahan penelitian adalah terbitan Mei – September 2020.

Sumber data lainnya dikumpulkan melalui media sosial Twitter, dan Instagram Nagara Institute. Selain itu, dalam penelitian ini bekerja sama dengan 20 informan di beberapa daerah.

C. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Juli – September 2020. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam rangka pengumpulan data sebagai berikut:

1. Mengumpulkan berita *online* terkait pemilihan kepala daerah, dinasti calon kepala daerah, dan catatan hukum kepala daerah mulai bulan Mei – September 2020
2. Mengumpulkan data melalui hasil wawancara *online* dan komentar di media sosial Nagara Institute.
3. Melakukan analisis dan input hasil sumber ke dalam kolom *spreadsheet* yang sudah disediakan peneliti.
4. Mengklasifikasikan dinasti politik sesuai dengan hubungan kekerabatan serta catatan hukum calon kepala daerah.
5. Menganalisis calon kepala daerah yang terpapar dinasti politik dan sudah mendaftar ke KPU.

D. Teknik Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang lebih akurat dan terbukti kebenarannya, peneliti melakukan seleksi terkait data calon kepala daerah yang terpapar dinasti politik. Data yang sudah terkumpul dimasukkan ke dalam tabel untuk mempermudah saat menganalisis. Kemudian memastikan kembali data yang diambil melalui berita online, situs resmi KPU, dan dua orang *reviewer*.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pilkada 2020

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pelaksanaan pilkada di fase pertama tidak dilakukan secara serentak, melainkan terpisah-pisah antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Baru di tahun 2015 upaya penyerentakan dilakukan. Hingga hari ini, sudah tiga kali pilkada dilakukan secara serentak yakni di tahun 2015, 2017 dan 2018. Pilkada tahun 2020 adalah pilkada serentak ke-4 yang diselenggarakan di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 223 kabupaten, dan 37 kota. Berdasarkan data KPU per-3 Oktober 2020, KPU menyatakan bahwa pasangan calon yang memenuhi syarat

berjumlah 719 pasangan calon. Data ini direkap sejak 27 September - 03 Oktober 2020 per pukul 15.00 WIB. Dalam rekapan itu, tertulis KPU menerima 24 bakal pasangan calon Pilgub, 595 bakal pasangan calon pemilihan bupati, kemudian 100 bakal pasangan calon pemilihan wali kota/wakil wali kota.

Berdasarkan jumlah 719 pasangan calon, jumlah yang maju melalui **jalur perseorangan (independen) sebanyak 65 pasang calon**. Sementara, bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota dari **jalur partai (parpol) politik sebanyak 654 pasang calon**. Dari 719 calon tersebut, secara gender didominasi oleh **laki-laki dengan total 89,3 %**, sedangkan **perempuan berjumlah 10,7 %**.

#MembongkarDinastiPolitik

**CALON KEPALA DAERAH/CALON WAKIL KEPALA DAERAH
BERDASARKAN GENDER**

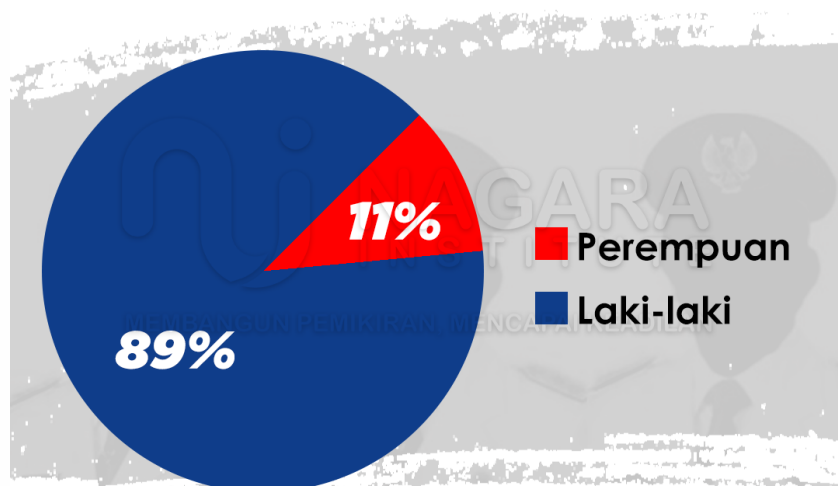


Diagram 1

B. CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH YANG MEMILIKI HUBUNGAN KEKERABATAN/DINASTI POLITIK DENGAN PEJABAT PUBLIK ATAU ELIT PARTAI POLITIK

Dinasti politik merupakan jenis lain dari transisi dan sirkulasi kekuasaan politik yang melibatkan anggota keluarga. Dinasti politik terbagi menjadi tiga model. *Pertama*, model dimana satu keluarga memegang penuh kekuasaan dan menggumpal dalam satu lingkaran kekerabatan serta dilakukan atas regenerasi keluarga yang sama. *Kedua*, model satu keluarga yang terbagi atas politik lintas kamar kekuasaan, ayah menjabat sebagai Bupati, anak menjabat sebagai ketua DPRD, serta jabatan strategis lainnya. *Ketiga*, model dinasti lintas daerah, dimana ada setidaknya 2 politisi yang berkuasa di daerah yang berbeda, namun kedua politisi tersebut sejatinya masih terikat dalam satu lingkaran keluarga (Jaweng:2017).

Lebih jauh, keberadaan politik dinasti merupakan salah satu penyebab kompetisi antar calon dalam pemilihan berjalan tidak *fair*. Calon yang didukung oleh dinasti politik biasanya memiliki potensi menang lebih besar. Bagaimanapun, pada suatu dinasti politik hampir dapat dipastikan mempunyai jaringan tim pemenangan yang sudah mapan, terstruktur dan menggurita. Intinya, calon kepala daerah yang berasal dari dinasti politik memiliki keunggulan dalam memenangkan kompetisi dibanding dengan calon lainnya baik karena sumber daya, popularitas, maupun jaringan elit politik dan kekuasaan yang masif untuk menggiring rakyat/pemilih memilihnya (Dal Bo, Dal Bo, dan Snyder: 2009). Dengan kondisi tersebut maka kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki calon dari suatu dinasti bisa saja dianggap bukan variabel penting.

Hal demikian menempatkan dinasti politik sebagai ancaman problematis dalam kehidupan politik. Dalam kerangka konsolidasi demokrasi, praktik dinasti politik mempersempit ruang partisipasi publik sekaligus menegasikan salah satu prinsip dasar demokrasi yakni kesetaraan politik. Dinasti politik juga menjadikan oligark¹ kian mapan di tingkat daerah yang berpotensi melemahkan mekanisme *checks and balance* karena jabatan-jabatan politik dikuasai oleh satu keluarga.

Dinasti politik menambah kekhawatiran atas ketidaksetaraan dalam distribusi kekuatan politik dapat mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis. Sisi lain, probabilitas keterpilihan yang lebih besar pada calon berlatar belakang dinasti telah menghalangi sirkulasi elit menjadi berhenti di satu keluarga dan karenanya menghalangi adanya perubahan kebijakan. Saat perubahan kebijakan berpotensi tidak dapat terwujud disebabkan adanya dominasi keluarga yang menguasai/melanjutkan kekuasaan, maka terbuka kemungkinan dinasti politik akan semakin dekat dengan praktik KKN (perilaku predatoris) di daerah, seperti yang baru terjadi di Kutai Kalimantan Timur oleh pasangan suami-istri Ismundar.

¹ Oligarki dalam konteks ini adalah oligarki dalam konsep yang disampaikan Richard Robinson dan Vedi R Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. 2004.

Realita dinasti politik yang demikian salah satunya disebabkan oleh pedang bermata dua dari desentralisasi dan otonomi daerah. Selain memberikan kekuasaan pada daerah membentuk rumah tangganya sendiri, desentralisasi otonomi daerah memicu adanya desentralisasi korupsi yang tersebar ke berbagai daerah kemudian menyeret elite politik. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan otonomi daerah mendorong terjadinya desentralisasi oligarkis dan terjadinya praktik dinasti politik. Raja-raja kecil di daerah yang lahir dari otonomi daerah akhirnya menjadikan Pilkada sebagai industri pertahanan kekuasaan yang berkorelasi juga pada industri pertahanan kekayaan (Richard Robinson dan Vedi R Hadiz: 2004; Winters 2011).

Selain itu terdapat beberapa gejala yang mendasari terbentuknya suatu dinasti. Pertama, macetnya kaderisasi partai politik dalam menjaring calon kepala daerah yang berkualitas, sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan sanak keluarga kepala daerah untuk menjadi pejabat publik. Menyitir pandangan dari Yoes C. Kenawas dalam artikelnya berjudul *Dynastic Politics: Indonesia's New Normal*, hubungan dinasti politik dengan partai politik adalah simbiosis mutualisme/saling menguntungkan. Setiap kandidat dinasti tentunya membutuhkan dukungan partai politik yang sudah memiliki mesin penggerak yang terbilang mapan untuk mensukseskan calon dinasti dalam pilkada. Begitu pula calon dinasti, mereka juga memiliki sumber daya, uang dan jaringan untuk menjalankan kampanye mereka secara efektif. Partai politik juga mengharapkan politisi dinasti dapat berkontribusi besar pada partai, dan mendanai operasional partai sehari-hari di daerah. Pola saling menguntungkan ini terawat baik dalam perkembangan politik di Indonesia.

Kedua, konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi status *quo* di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahana (Djati:2012). Hampir serupa dengan yang dikatakan Yoes C. Kenawas yang menjelaskan selain dari faktor partai politik, keberadaan dinasti politik disebabkan faktor lemahnya UU Pemilu. (Kenawas:2016)

Dinasti politik tidak hanya menjadi problem demokrasi nasional yang dialami Indonesia, melainkan juga masalah yang juga dialami oleh berbagai negara lain. Siddharth Eapen George dan Dominic Ponattu (2018) dalam karyanya *Like Father, Like Son? How Political Dynasties Affect Economic Development* menyebutkan terdapat 145 negara di belahan dunia yang terjangkit dinasti politik. Lebih lengkapnya, mereka mengatakan:

Political dynasties are ubiquitous in democratic countries, even though many countries democratised to move away from hereditary rule. Nearly 50% of democratic countries have elected multiple leaders from the same family, and 15% are currently led by a descendant of a former leader. Political dynasties are present in over 145 countries around the world, yet we have limited understanding of how they affect economic development.

(terjemahan bebas: Dinasti politik ada di mana-mana di negara-negara demokratis, meskipun banyak negara yang didemokratisasi untuk menjauh dari pemerintahan turun-temurun. Hampir 50% negara demokratis telah memilih banyak pemimpin dari keluarga yang sama, dan 15% saat ini dipimpin oleh seorang keturunan mantan pemimpin. Dinasti politik hadir di lebih dari 145 negara di seluruh dunia, namun kita memiliki pemahaman yang terbatas tentang bagaimana mereka memengaruhi pembangunan ekonomi).

Kedua peneliti tersebut juga mengatakan bahwa dinasti politik memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Selain itu, kebijakan di masa mendatang juga menjadi hal yang terkena imbas, dinasti politik memiliki kecenderungan menghasilkan kebijakan yang negatif. Yasushi Asako, dkk (2012) dalam penelitiannya berjudul *Dynastic Politicians: Theory and Evidence from Japan* menegaskan:

[O]ur research implies that political dynasties have a negative consequence for democratic policy making. Dynastic politicians may be socially inefficient because their electoral advantage deters non-dynastic candidates from running for office, even if constituents prefer non-dynastic candidates to dynastic ones. Further, the large presence of dynastic legislators may result in less optimal policies for the majority of Japanese citizens. A similar discussion can be applied to other countries with a considerable presence of political dynasties.

(terjemahan bebas: penelitian kami menyiratkan bahwa dinasti politik memiliki konsekuensi negatif bagi pembuatan kebijakan yang demokratis. Politisi dinasti mungkin tidak efisien secara sosial karena keunggulan elektoral mereka menghalangi kandidat non-dinasti untuk mencalonkan diri, bahkan jika konstituen lebih memilih kandidat non-dinasti daripada yang dinasti. Selain itu, kehadiran legislator dinasti yang besar dapat mengakibatkan kebijakan yang kurang optimal bagi mayoritas warga Jepang. Diskusi serupa dapat diterapkan di negara-negara lain yang memiliki banyak dinasti politik).

Pendapat lebih menukik juga dikemukakan oleh Carlos Velasco Rivera (2017) dalam karyanya *Political Dynasties and Party Strength: Evidence from Victorian Britain*. Semula ia mengatakan bahwa dinasti politik dibenarkan jika dominasi keluarga yang menduduki pemerintahan itu mampu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sayangnya itu tidak pernah terjadi. Justru dinasti politik menggugurkan persamaan kesempatan antar warga negara dalam ikut serta dalam pemerintahan. Anggota dinasti politik selalu memiliki keistimewaan yang menjadikannya tidak setara dengan non-dinasti politik. Lebih lengkap Carlos Velasco Rivera mengatakan:

Dynasties represent a form of elite entrenchment and the unequal distribution of political power in democracies. From a Rawlsian perspective, one could justify this type of inequality if it improved the

welfare of society at large. However, this seems hardly the case. There is no evidence dynastic politicians (defined as those who have a least one relative who served in office prior to their starting their career) improve the welfare of citizens and the persistence of dynasts in power may allow their family members to accumulate rents (Folke, Persson, and Rickne, Forthcoming). Political dynasties also undermine the quality of representation in other ways. Often, for example, members of dynasties represent the most privileged classes in their country. By giving voice to a narrow set of interest in the legislature, dynasts violate the principle of descriptive representation.

(terjemahan bebas: Dinasti mewakili bentuk kubu elit dan distribusi kekuatan politik yang tidak merata di negara demokrasi. Dari perspektif Rawlsian, ketidaksetaraan jenis ini dapat dibenarkan jika hal itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Namun, tampaknya tidak demikian. Tidak ada bukti politisi dinasti (didefinisikan sebagai mereka yang memiliki setidaknya satu kerabat yang bertugas sebelum memulai karir mereka) meningkatkan kesejahteraan warga dan kegigihan dinasti yang berkuasa dapat memungkinkan anggota keluarga mereka mengumpulkan uang sewa (Folke, Persson, dan Rickne, Forthcoming). Dinasti politik juga merusak kualitas representasi dengan cara lain. Seringkali, misalnya, anggota dinasti mewakili kelas paling istimewa di negara mereka. Dengan menyuarakan kepentingan sempit di badan legislatif, dinasti melanggar prinsip representasi deskriptif).

Melihat praktik di beberapa negara demokrasi dan juga pengalaman yang terjadi di beberapa daerah khususnya paska reformasi, di tahun 2015 terobosan dilakukan oleh pembentuk undang-undang dengan membentuk aturan untuk membelenggu suburnya dinasti politik di tingkat lokal. Politik hukum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang adalah dengan melarang calon kepala daerah/wakil kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Hal ini dituangkan dalam pasal 7 huruf r UU Pilkada yang berbunyi: *“Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”*. Penjelasan dari frasa *tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana* adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.

Ratio legis/alasan dibentuknya pasal tersebut dalam *memorie van toelichting* adalah untuk memberikan respon terhadap perkembangan dinamika otonomi daerah yang banyak dijangkiti oleh dinasti politik yang begitu destruktif. Sirkulasi kepala daerah menjadi tidak sehat dan berhujung pada dominasi keluarga tertentu di daerah yang berhujung pada perilaku korup. Saat aturan ini

dibentuk, memori publik masih masih hangat dengan dinasti Ratu Atut di provinsi Banten yang begitu kontroversi dan merugikan pemerintahan daerah.

Sayangnya aturan ini tidak bertahan lama, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 33/ PUU-XIII/2015 membatalkan keberadaan pasal 7 huruf r UU Pilkada yang berbunyi: *tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana*. Penjelasan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah: tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, menantu kecuali jeda 1 kali masa jabatan.

Putusan ini menimbulkan polemik serta kecemasan publik terutama yang berkaitan dengan konflik kepentingan keluarga petahana. Polemik ini muncul karena Putusan No. 33/PUU-XIII/2015 telah menyatakan praktik dinasti politik sebagai praktik yang sah sesuai dengan konstitusi. Putusan ini dinilai menegasikan realita politik yang terjadi di tingkat lokal.

Salah satunya adalah data Kementerian Dalam Negeri yang menunjukkan sejak pilkada langsung dilaksanakan pada tahun 2005-2014, setidaknya ada 59 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang mempunyai ikatan darah. Setelah putusan MK dinasti politik kian meningkat. Pilkada tahun 2015, 2017 dan 2018 menghasilkan 86 kepala daerah yang terpapar dinasti politik (Riset Nagara Institute Februari 2020). Terdapat perkembangan jumlah politisi yang signifikan dari waktu ke waktu. Kenaikan angkat dinasti politik ini memberikan sinyal bahwa putusan MK yang melegalkan dinasti politik disambut dengan *euforia* oleh raja-raja kecil di tingkat lokal, yang akhirnya membengkaknya jabatan kepala daerah yang diwarnai oleh hubungan kekeluargaan.²

² 2005-2014 memiliki kurun waktu panjang yakni 9 tahun. Angka dinasti politik berjumlah 59. Sedangkan hanya kurun waktu 3 tahun (2015-2018) angkanya meningkat jadi 86. Pada pilkada 2020 mendatang peningkatan terjadi semakin signifikan yakni sejumlah 120 orang, namun angka 120 orang tersebut masih bersifat calon.



Diagram 2

Lantas bagaimana dengan pilkada serentak bulan Desember mendatang? Temuan Nagara Institute menunjukkan, Calon Kepala daerah dalam pilkada serentak 2020 yang terpapar dinasti politik berjumlah 124 calon. Meski masih berstatus calon, angka ini terbilang fantastis, dengan rincian sebagai berikut:

1. 57 calon bupati dan 30 calon wakil bupati
2. 20 calon walikota dan 8 calon wakil walikota.
3. 5 calon gubernur dan 4 calon wakil gubernur.

#MembongkarDinastiPolitik

**SEBARAN DINASTI POLITIK
DALAM PILKADA 2020**

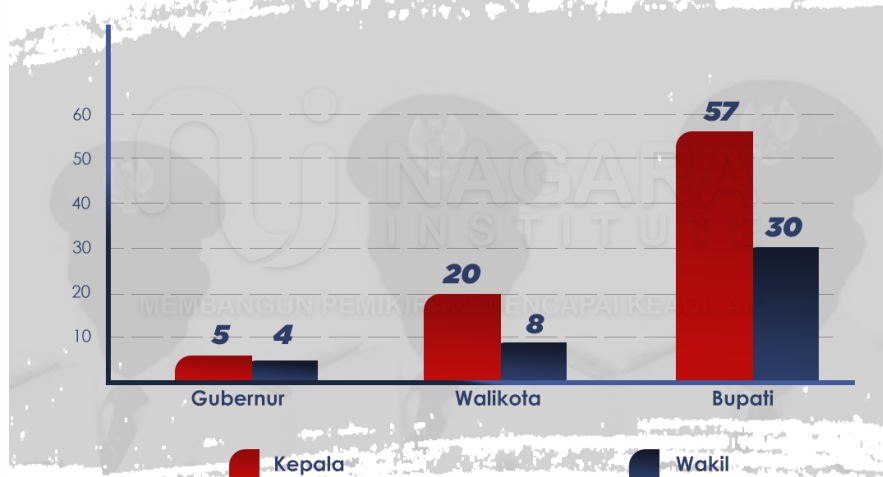


Diagram 3

Dari 124 calon dinasti tersebut, jika dirinci berdasarkan kedudukannya sebagai petahana/tidak, maka terdapat 22 calon Kepala Daerah yang merupakan dinasti politik, dan sisanya berjumlah 102 adalah calon kepala daerah pendatang baru.

#MembongkarDinastiPolitik

**CALON KEPALA DAERAH/CALON WAKIL KEPALA DAERAH
 DINASTI POLITIK PETAHANA/PENDATANG BARU**

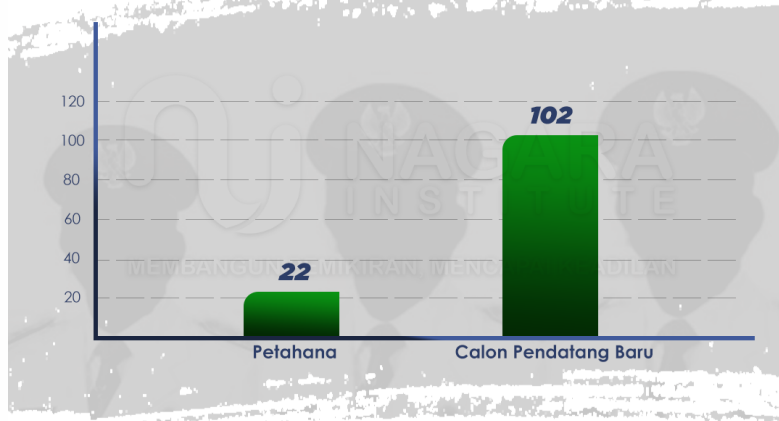


Diagram 4

Dari 124 calon tersebut, jika dirinci berdasarkan gender berjumlah 67 laki-laki dan 57 perempuan.

#MembongkarDinastiPolitik

**CALON KEPALA DAERAH/CALON WAKIL KEPALA DAERAH
 DINASTI POLITIK BERDASARKAN GENDER**

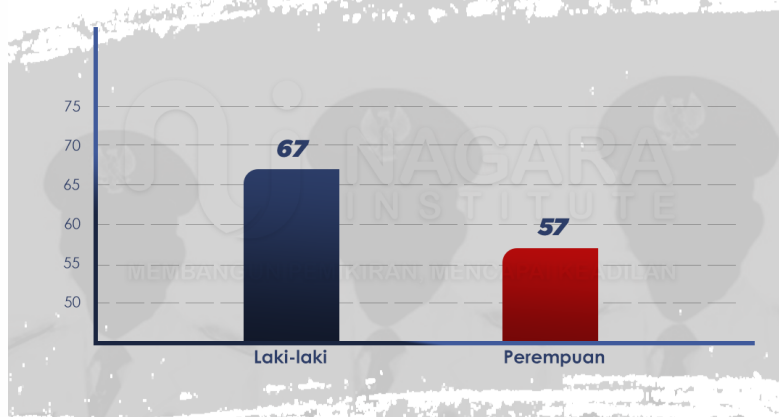


Diagram 5

Dari 124 calon dinasti tersebut, jika dirinci berdasarkan partai pengusung, partai Golkar adalah partai politik terbanyak yang mengusung dinasti politik, disusul oleh partai PDIP Dan partai NASDEM.

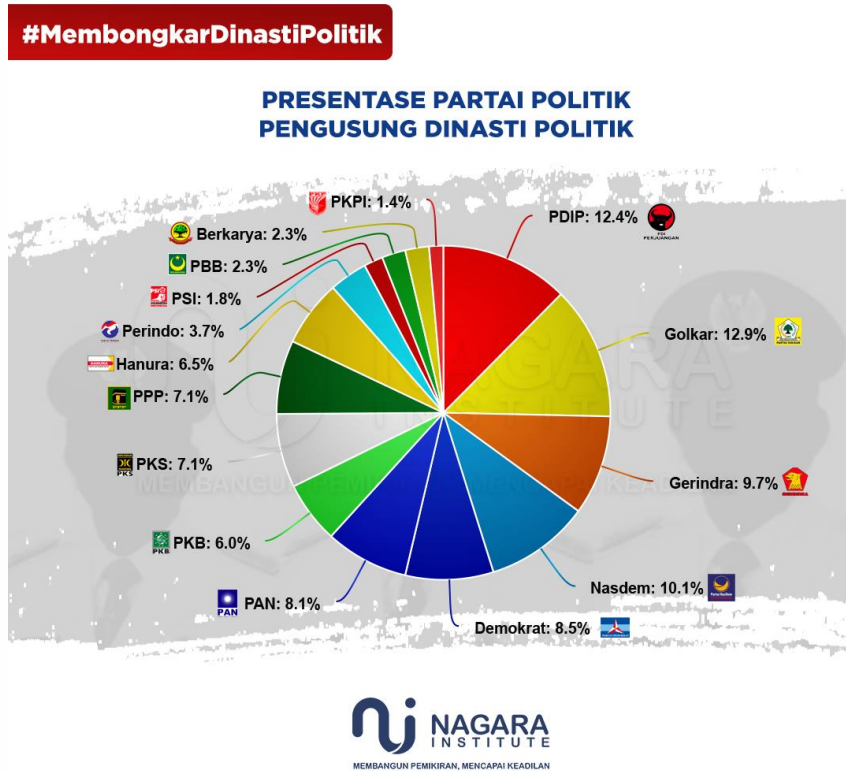


Diagram 6

#MembongkarDinastiPolitik

**SEBARAN DINASTI POLITIK DI SELURUH INDONESIA
DALAM PILKADA 2020**

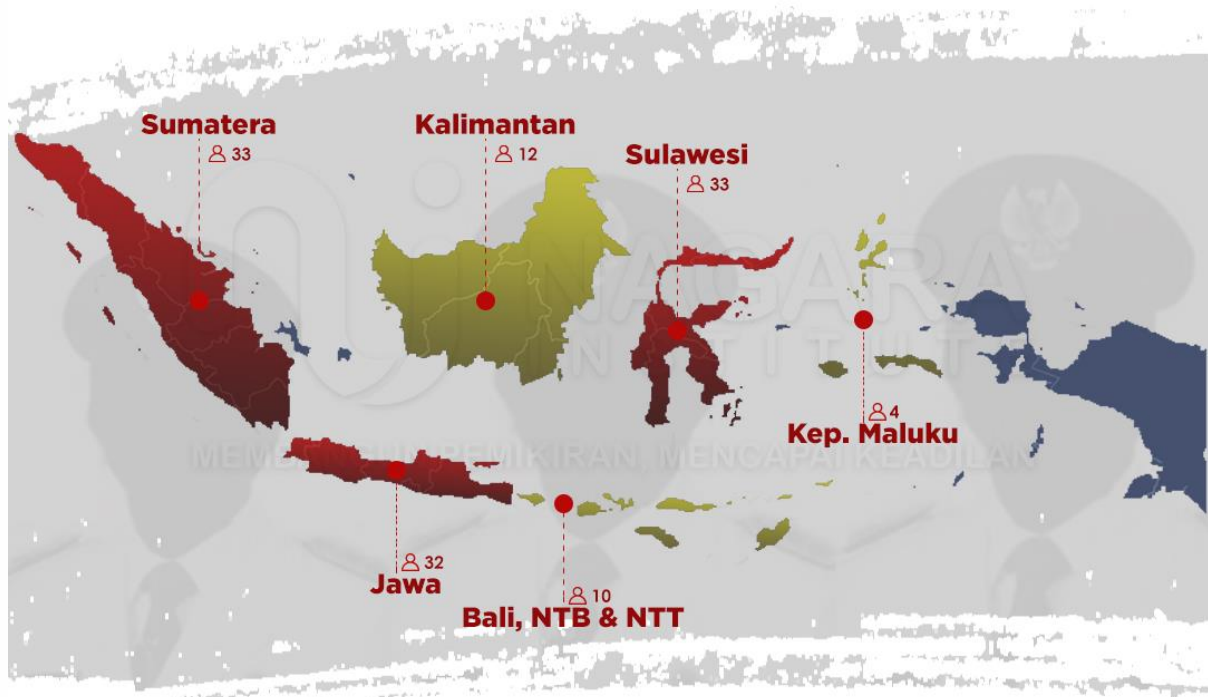


Diagram 7

C. BEBERAPA KASUS PILIHAN

1. Dinasti Politik Presiden Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia adalah jabatan tertinggi dari organisasi negara, yakni sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara secara bersamaan. Sebagai seorang Presiden, maka tentu ia memiliki pengaruh besar terhadap segala lini kehidupan apapun. Saat ini Presiden Joko Widodo masih menjabat, dan dalam masa jabatannya sang anak Gibran Rakabuming Raka maju di Pilkada kota Solo dan mantunya Bobby Nasution maju di Pilkada kota Medan.

Pada pilkada Solo, PDIP telah memberikan rekomendasi kepada Gibran Rakabuming Raka guna mengikuti Pilkada Solo. Putra sulung Presiden Jokowi itu akan dipasangkan dengan Sekretaris DPC PDIP Solo, Teguh Prakosa. Pengangkatan Gibran berdasarkan surat keputusan nomor 168/IN/DPP/VII/2020. Surat ditandatangani Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto dan Sekretaris Jendral Hasto Kristiyanto. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka bersaing dengan Achmad Purnomo sebagai bakal calon kepala daerah Solo. Namun belakangan, Purnomo yang sempat mendapatkan rekomendasi dari DPC PDIP Solo mengundurkan diri dari pencalonan.

Gibran yang terhitung sebagai pendatang baru dalam dunia politik, mampu menyisihkan Achmad Purnomo yang sudah 'kenyang' dengan riwayat jabatan dan segudang pengalaman birokrasi. Achmad Purnomo merupakan Wakil Wali kota Surakarta (2013—2015) dan Wakil Wali kota Surakarta (2016-2021). Sulit untuk mengatakan bahwa Gibran tidak mendapatkan perlakuan istimewa dari partai pengusungnya, terlebih belum genap 2 tahun ia berproses sebagai kader di partai banteng tersebut.

2. Kompetisi Antar Dinasti Politik

Model dinasti politik pada pilkada 2020 memiliki varian lain, yakni adanya kompetisi antar dinasti politik. Kompetisi antar dinasti ini terbagi menjadi dua, yakni kompetisi antara satu dinasti politik dengan dinasti politik lainnya seperti yang terjadi di Tangerang Selatan. Dan kompetisi antara 'sesama' dinasti politik dalam satu keluarga seperti yang terjadi di Kabupaten Pangkep.

Model pertama, di kursi walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan ini sedang diperebutkan oleh beberapa dinasti politik. Terdapat tiga nama yang disebut-sebut terkait dengan dinasti politik, yang akan memperebutkan kursi kepala daerah, Mereka adalah Siti Nur Azizah yang merupakan putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang merupakan keponakan Ketua Umum Gerindra dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Pilar Saga yang merupakan anak dari Ratu Tatu Chasanah, dan masih kerabat dekat Ratu Atut Chosiyah. Kompetisi perebutan calon kepala daerah di kota ini tergolong *fair* meski dijangkiti oleh dinasti

politik, karena kompetisi yang terbangun memiliki basis kekutatan yang berimbang yakni pertarungan antar dinasti.

Model kedua, kompetisi antara ‘sesama’ dinasti politik dalam satu keluarga seperti di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya, kabupaten ini dipimpin oleh Syamsuddin A. Hamid selama dua periode berturut-turut (2010-2021). Pada pilkada 2020 mendatang, bursa calon kepala daerah kabupaten Pangkep banyak dihiasi oleh lingkaran keluarga dari Syamsuddin A. Hamid yang sebelumnya menjabat. Andi Ilham Zainuddin, saudara ipar dari bupati Syamsuddin Hamid berpasangan dengan Rismayani yang merupakan istri dari Syamsuddin A. Hamid. Uniknya dinasti politik ini memiliki rival yang juga merupakan keluarganya sendiri. Mereka akan melawan Muhammad Yusran Lologau yang merupakan keponakan dari Syamsuddin A. Hamid. Rival lainnya, yakni Andi Nirawati yang merupakan istri dari Kamrussamad yang merupakan anggota DPR-RI.

Artinya, di kabupaten ini genap seluruh bursa calon memiliki hubungan keluarga dengan para pejabat publik/elit partai politik. Keunikan yang dimiliki kabupaten ini adalah dalam satu patron dinasti politik yakni Syamsuddin A. Hamid saling berkompetisi, yakni istri-ipar vs keponakan.



3. Kepala Daerah Perempuan: Antara Partisipasi dan Eksploitasi

Pada pilkada sebelumnya, terdapat istri kepala daerah maju untuk menggantikan suaminya sebagai kepala daerah. Model seperti ini terdapat di Jawa Timur, yakni di Kota Batu. Wilayah yang tergolong sebagai kota baru ini, pernah dipimpin oleh Eddy Rumpoko sejak tahun 2007-2017/dua periode. Pada saat menjabat, sang Istri Dewanti Rumpoko pernah maju sebagai Calon Bupati Kabupaten Malang di tahun 2015. Sayangnya petahana Rendra Kresna berhasil mengungguli pilkada di tahun tersebut. Setelah kalah di Pilkada kabupaten Malang 2015, Dewanti bergeser ke Pilwalkot Batu 2017. Ia memenangkan pilwalkot dan berhasil menjadi walikota Batu menggantikan suaminya.

Model dinasti politik yang menjadikan istri sebagai kepala daerah, menjadikan partisipasi politik perempuan mendapat sorotan. Apakah istri tersebut benar-benar berpartisipasi sebagai calon kepala daerah 'murni' dari kehendaknya sehingga ia mampu menjadi aktor keterwakilan perempuan di pemerintahan, atau istri/perempuan tersebut hanya menjadi aktor panggung pelanggaran dinasti politik dari kekuasaan suami sebelumnya.

Model dinasti politik seperti ini berkembang subur di beberapa daerah lain dengan sebaran yang cukup merata mulai dari Sumatera – Jawa. Mulai dari Provinsi Jambi, Diawali dengan Zulkifli Nurdin yang menjabat menjadi Gubernur Jambi dua periode berturut-turut (1999-2010). Ia memiliki anak bernama Zumi Zola hasil dari pernikahannya dengan Harmina Djohar. Setelah Zulkifli Nurdin habis masa jabatannya, dinasti ini mulai melebarkan kekuasaannya dengan menyadurkan Zumi Zola menjadi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2011-2016 berpasangan dengan Ambo Tang sebagai wakil bupati.

Pada 6 Oktober 2015 Zumi Zola mundur dari jabatannya sebagai bupati karena maju dalam Pemilihan umum Gubernur Jambi 2015. Zumi Zola memenangkan Pilgub Jambi dan resmi menjabat sebagai Gubernur periode 2016- 2021. Tak sampai habis masa jabatannya, Zumi Zola dicokok KPK pada tahun 2018 karena melakukan suap RAPBD Jambi tahun anggaran 2018. Pada pilkada 2020, Ratu Munawaroh yang merupakan ibu tiri dari Zumi Zola dan suami dari Zulkifli Nurdin masuk ke dalam bursa pilgub Jambi 2020 mendatang. Pola dinasti politik di provinsi Jambi ini terbilang kokoh karena berada dalam level provinsi yang cakupannya besar, dengan pola ayah, istri dan juga anak sebagai aktor yang terlibat.

#MembongkarDinastiPolitik

**KEPALA DAERAH PEREMPUAN:
 ANTARA PARTISIPASI DAN EKSPLOITASI**



Di provinsi Jawa Barat, dalam pilkada kabupaten bandung ada Kurnia Agustina yang merupakan istri dari Dadang M. Nasser (Bupati Bandung 2 periode/2010-2021). Kurnia Agustina maju menjadi calon kepala daerah kabupaten Bandung berpasangan dengan Usman Sayogi.

Bergeser ke Jawa Tengah, model istri kepala daerah maju dalam pilkada terdapat di Kabupaten Blora. Umi Kulsum yang merupakan istri Bupati Blora 2 periode/2010-2021 Djoko Nugroho, maju ke dalam bursa calon kepala daerah pilkada 2020 berpasangan dengan Agus Sugiyanto. Masih di provinsi Jawa Tengah, di kabupaten Semarang terdapat Bintang Narsasi yang merupakan istri dari Mundjirin yang maju dalam pilkada 2020 mendatang. Mundjirin merupakan bupati Semarang yang menjabat dua periode berturut-turut/2010-2021. Selain kabupaten Semarang, di kabuparen Sukoharjo juga terdapat istri kepala daerah sebelumnya yang maju dalam pilkada mendatang. Ia adalah Etik Suryani, istri dari Wardoyo Wijaya yang merupakan bupati yang menjabat dua periode berturut-turut/2010-2021.

Di Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) istri Bupati Sri Purnomo yaitu Sri Kustini Purnomo maju menjadi calon kepala daerah didukung oleh partai PDIP dan PAN yang memiliki 21 kursdi di DPRD Kabupaten Sleman. Majunya istri Bupati Sri Purnomo dalam pilkada 2020, mengembalikan koalisi awal yang memenangkan Sri Purnomo dan Yuni Satya Rahayu dalam Pilkada Sleman 2010. Jika Kustini Sri Purnomo terpilih dalam Pilkada Sleman 2020, maka *local strongman* Sri Purnomo sukses membangun

“dinasti” dalam politik lokal di Kabupaten Sleman. Sebagaimana riset dan kajian sebelumnya, kemunculan dinasti dalam politik lokal diawali dengan menguatnya kekuasaan *local strongman*. Meminjam argumen John T. Sidel (1999), *local strongman* ini, kemudian menjadi *local bossism* yang pada akhirnya mereka membangun politik dinasti dan kemudian nanti bercokol menjadi oligarkis yang menguasai politik lokal di Kabupaten Sleman.

Masih di pulau Jawa, selanjutnya adalah provinsi Jawa Timur. Di provinsi ini, selain dari keluarga Eddy Rumpoko, juga terdapat keluarga dari Abdullah Azwar Anas di Kabupaten Banyuwangi. Ia sudah menjabat dua periode berturut-turut/2010-2021 dan saat ini sang istri Ipuk Fiestiandani maju menjadi calon kepala daerah di pilkada mendatang. Dari seluruh istri yang maju ke pilkada mendatang khususnya di pulau Jawa memiliki pola yang sama yakni, seluruhnya adalah istri dari kepala daerah yang telah menjabat dua periode berturut-turut. Artinya dugaan adanya keinginan untuk mempertahankan kekuasaan kian mengencang, dan keinginan adanya hegemoni keluarga dalam pemerintahan daerah kian menguat. Model dinasti politik dimana istri memiliki keinginan untuk melanjutkan kekuasaan suaminya merupakan kecenderungan untuk “mengamankan” program kepala daerah sebelumnya. Hal ini terkait reproduksi wacana heroisme dan populisme program pemerintahan sebelumnya yang dijadikan bahan kampanye sang istri untuk menggantikan suaminya terdahulu.

Sebagai langkah mengamankan program bupati sebelumnya yang sudah dinilai baik maka istrinya didorong menjadi bupati. Sementara itu, suaminya akan bertindak sebagai *godfather* di balik pemerintahan istrinya. Hal inilah yang bisa ditangkap dalam perbincangan mantan bupati Kabupaten Indramayu Irianto M.S. Syafiuddin (2000-2010) dengan presenter Metro TV Najwa Shihab dalam acara “Mata Najwa” 6 Juni 2012, ketika mengangkat tema “Kuasa Gono-Gini”. Dalam perbincangan itu disebutkan bahwa tidak hanya Bupati Indramayu, namun kebanyakan mantan bupati yang diundang dalam acara tersebut mengakui bahwa dirinya masih berperan penting dalam pemerintahan istrinya seperti memberi arahan, nasihat, maupun petunjuk dalam mengeluarkan kebijakan tertentu. Meskipun istrinya telah menjadi bupati formal, suami masih berperan besar menjadi bupati informal yang bisa memberikan masukan tertentu kepada istrinya. Artinya, pengaruh *maskulinisme* kuasa keluarga masih berlaku dalam pemerintahan sekalipun kedudukan istrinya lebih tinggi sebagai bupati daripada suaminya yang kembali sebagai orang biasa biasa. Kondisi itu turut juga mengubah paradigma rumah tangga yang semula hanya berwujud satu rumah kini telah berwujud daerah. Dalam tataran inilah, “kuasa gono-gini” tersebut berlaku. Istri berada di ranah formal sementara suami berada di arena sosial informal (Wasisto Raharjo Djati:2013).

Pola ini terus berulang, mulai dari peran suami yang mengambil posisi informal dan kepala daerah yang istrinya maju mayoritas dari kepala daerah yang sudah menjabat dua periode berturut-turut. Selain dari pulau Jawa, berikut hasil riset Nagara Institute di beberapa provinsi lainnya:

Tabel 1. Istri Kepala Daerah yang Maju dalam Pilkada 2020

No	Nama	Daerah	Istri Dari
1.	Ipuk Fiestiandani Azwar Anas	Kab. Banyuwangi	Azwar Anas Bupati Banyuwangi sebelumnya dua periode
2.	Susilawati	Kab. Rejang Lebong	Suherman Bupati Rejang Lebong periode 2006-2011 dan 2011-2016
3.	Winda Fitrika	Kab. Asahan	Alm. Taufan Gama S. Wakil Bupati Asahan periode 2010 – 2015 dan 2016-2021
4.	Lisa Andriani Lubis	Kota Binjai	Muhammad Idaham Walikota Binjai 2 Periode yaitu 2010-2015 dan 2016-2021
5.	Yunninta Asmara	Kab. Batanghari	Syahirsyah SY Bupati Batanghari periode kedua yakni 2016-2021
6.	Ratu Munawaroh	Provinsi Jambi	Alm. Zulkifli Nurdin mantan Gubernur Jambi periode 1999-2004 dan 2005-2010
7.	Debby Vita Dewi	Kab. Bangka Selatan	H. Jamro Mantan Bupati Bangka Selatan periode 2010-2015
8.	Merlin Agustin	Provinsi Kepulauan Riau	Muhammad Rudi Wali Kota Batam periode 2016–2021
9.	Nessy Kalvia	Kab. Lampung Tengah	Mustafa mantan Bupati Lampung Tengah 2016-2018
10.	Eva Dwiana	Kota Bandar Lampung	Herman Hasanusi Walikota Bandar Lampung 2 Periode 2010-2015 dan 2016-2021
11.	Rezita Meylani Yopi	Kab. Indragiri Hulu	Yopie Arianto Bupati Indragiri Hulu 2010-2015 dan 2016-2021
12.	Irna Naurilita	Kab. Pandeglang	Dimiyati Natakusumah

			mantan Bupati Pandeglang dua periode (2000-2009)
13.	Kurnia Agustina	Kab. Bandung	Dadang Naser Bupati Bandung saat ini periode 2016-2021
14.	Umi Kulsum	Kab. Blora	Djoko Nugroho Bupati Blora periode 2010-2015 dan 2016-2021
15.	Bintang Narsasi	Kab. Semarang	Mundjirin Bupati Semarang periode 2016-2021
16.	Etik Suryani	Kab. Sukoharjo	Sukoharjo Wardoyo Wijaya Bupati Sukoharjo 2016-2021
17.	Sri Kustini	Kab. Sleman	Sri Purnomo Bupati Sleman Periode 2010-2015 Dan 2016-2021, Dan Wakil Bupati Sleman Periode 2005-2010
18.	Indah Dhamayanti	Kab. Bima	(Alm.) H. Ferry Zulkarnain mantan Bupati Bima dua periode (2005-2010) dan (2010-2015)
19.	Hj Eri Aryani Abubakar	Kab. Dompu	H. Bambang M. Yasin Bupati Dompu Periode 2010-2015 Dan 2016-2021
20.	Kristiana Muki	Kab. Timor Tengah Utara	Raymundus Sau Fernandes Bupati TTU Periode 2010-2015 Dan 2016-2021
21.	Umi Suhartini	Kab. Tana Tidung	Undunsyah Bupati Tana Tidung pertama periode 2010-2015 dan 2016-2021
22.	Henny Dwi Rini	Kab. Melawi	Almarhum H. Firman Muntaco mantan Bupati Melawi periode 2010-2015
23.	Safitri Malik Souliisa	Kab. Buru Selatan	Tagop Sundarsono Souliisa Bupati Buru Selatan 2016-2019
24.	Herny	Kab. Pasangkayu	Agus Ambo Djiwa Ketua PDIP Sulbar yang juga Bupati Pasangkayu periode 2010-2015 dan 2016-2021
25.	Rismayani	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Syamsuddin Hamid bupati pangkep 2016-2021

26.	Fatmawati Rusdi	Kota Makassar	Rusdi Masse Mappasessu Anggota DPR RI Periode 2019-2024. Pernah Menjabat Sebagai Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2008-2013 dan 2013-2018
27.	Holiliana Tumimomor	Kab. Morowali Utara	Ir. Aptripel Tumimomor, M.T. Bupati Morowali Utara sejak tanggal 17 Februari 2016 hingga kematiannya pada tanggal 2 April 2020
28.	Julyeta Paulina	Kota Manado	Veky Lumentut Walikota Manado Periode 2010-2015 Dan 2016-2021
29.	Patmawati Fahmi	Kab. Majene	Isteri Bupati Majene Fahmi Massiara 2016-2021

C. JUMLAH CALON KEPALA DAERAH/WAKIL YANG BUKAN KADER PARTAI PENGUSUNG

Pilkada menggunakan sistem *First Past The Post* (FPTP). Sistem pemilu FPTP memperebutkan satu kursi di daerah pemilihan. Dalam sistem ini pemilih memilih calon dan calon yang dinyatakan menang adalah yang memiliki perolehan suara terbanyak. Oleh karenanya dalam pilkada terdapat fenomena *personal vote* dimana faktor figur calon lebih menjadi dasar pertimbangan oleh pemilih dalam menentukan pilihan ketimbang faktor partai politik pengusung (Fitriyah:2020). Karena yang menjadi primadona adalah personal calon kepala daerah/figur dibandingkan dengan faktor partai politik maka tantangan terhadap fungsi rekrutmen partai politik semakin besar. Partai politik akhirnya semakin tidak memperhatikan ikhwal kaderisasi partainya, tapi lebih sibuk untuk melirik orang lain yang memiliki popularitas meski bukan kader partainya. Pada akhirnya partai politik masuk ke dalam lingkaran pragmatisme yang tidak peduli dengan urusan-urusan ideologis dan kaderisasi partai. Salah satu eksekusi dari semua ini yang kian terasa adalah suburnya dinasti politik dalam pilkada. Ini akibat dari rekrutmen partai politik yang tidak ketat dan sandaran yang jelas.

Fungsi rekrutmen partai politik adalah fungsi klasik partai politik sebagai penjaga gerbang dalam pencalonan untuk semua jabatan di semua tingkatan pemerintahan. Proses perekrutan ke jabatan yang dipilih dan diangkat secara luas ini dianggap sebagai salah satu fungsi substansial terpenting bagi partai politik dengan konsekuensi munculnya potensi konflik di intrapartai, komposisi parlemen dan pemerintah, serta akuntabilitas dari para anggota yang terpilih (Noris:2006). Rekrutmen politik sebenarnya adalah fungsi yang menentukan menu calon pilihan yang disajikan terhadap rakyat dalam pilkada. Dengan fungsi ini, sebenarnya terjadi pemilihan berjenjang yang diawali terlebih dulu oleh pilihan partai politik terhadap calon kepala daerah, lalu hasil pilihan partai politik

yang kemudian akan disajikan pada masyarakat dalam pilkada. Itu sebab partai politik memiliki peran penting dalam demokrasi seperti yang dijelaskan oleh Susan Scarrow: *Political parties are crucial actors in representative democracies. Parties can help to articulate group aims, nurture political leadership, develop and promote policy alternatives, and present voters with coherent electoral alternatives* (Scarrow:2005). Oleh karena itu, tidak berjalannya rekrutmen partai politik dengan baik dapat berakibat gagalnya kepala daerah menjadi aktor dalam pembentukan *local good governance*.

Di Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) tidak mengatur secara tegas tentang proses rekrutmen partai politik. Tidak ada daya tekan bagi partai politik untuk melakukan rekrutmen secara ketat, dengan acuan yang jelas, dan mengutamakan kader yang sudah berproses lama di partai politik. Norma dalam UU Parpol hanya menjelaskan '*Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan*' (Vide Pasal 29 ayat 2 UU Parpol). Dengan demikian, tidak terukur secara jelas bagaimana rekrutmen secara demokratis dan terbuka seperti yang dijelaskan dalam UU Parpol. Justru UU Parpol mengatribusikannya pada AD/ART tiap-tiap partai untuk mengaturnya sendiri sehingga terjadi ketidakseragaman standar rekrutmen partai politik yang berujung terbukanya kesempatan elit partai melanggengkan kepentingan yang bersifat pragmatis.

Dominasi elit dalam kehidupan partai politik Indonesia dewasa ini memang menjadi ciri khas kehidupan politik Indonesia. Hegemoni otoritas partai masih kental di tangan segelintir orang kuat di partai politik. Pola kepemimpinan ini sulit untuk membuka ruang kebebasan bagi kader di bawah. Kebijakan partai politik bertumpuk pada kekuasaan elit partai, sehingga sulit untuk diterapkannya sistem otonomi kepartaian. Alhasil orientasi utama partai politik adalah sekedar "mempunyai orang" di jabatan publik untuk melanggengkan kehendak personal dan menghias sosok personal tersebut dengan lebih baik. Hal ini sangat mempengaruhi rekrutmen yang ujungnya sekedar "menemukan orang" yang dapat menarik publik tanpa perlu dipertalikan dengan sistem rekrutmen sebagai kader partai. Pola ini membuka peluang orang-orang untuk ikut dalam kekuasaan karena merasa mempunyai nama, memiliki modal, atau sebagai peluang melapangkan kepentingannya.

Pada pilkada 2020 hal ini masih menjadi pola yang terus berulang seperti pilkada sebelumnya. Seakan bukan hal tabu apabila ada calon yang seperti "kutu loncat". Mengawali karir politik di partai A, maju menjadi calon legislatif melalui partai B, dan di tahun berikutnya maju menjadi kepala daerah melalui partai C. Memang tidak ada norma hukum yang dilanggar, namun menjadi pertanyaan adalah bagaimana tentang proses kaderisasi dan rekrutmen partai. Apakah sesuai

hakikat partai politik dalam demokrasi? Ataukah partai politik hanya sekedar menjadi kendaraan pengantar saja?

Berikut hasil kajian Nagara Institute tentang fungsi rekrutmen partai politik dalam Pilkada 2020 dengan mengambil sampel dari dinasti politik yang berjumlah 124, yang terpapar dinasti terdapat 39 orang yang maju menjadi calon kepala daerah bukan kader partai politik pengusungnya, dengan rincian:

1. 9 calon walikota,
2. 28 calon bupati,
3. 2 calon gubernur

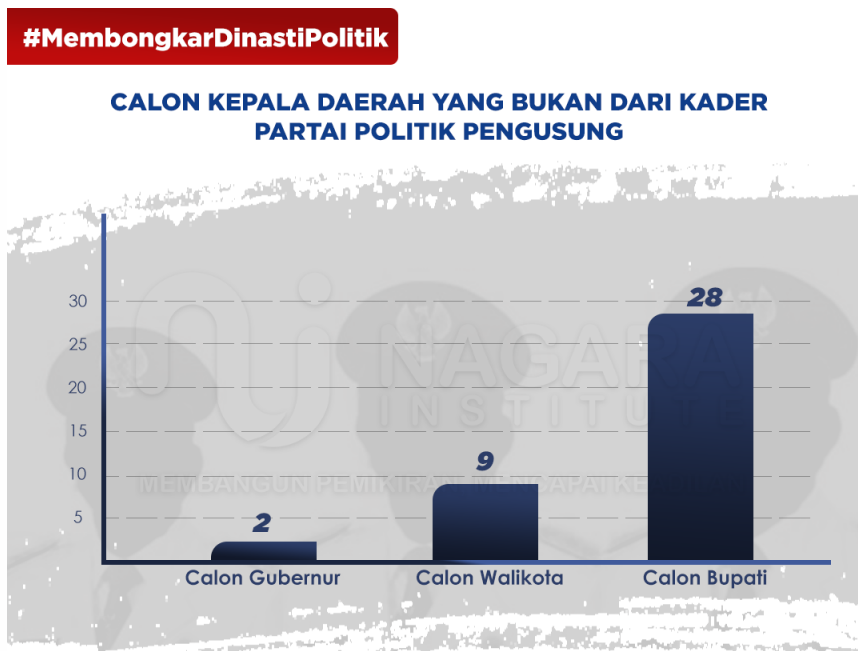


Diagram 10

Berdasarkan partai politik, partai **Nasdem** adalah partai yang menempati urutan pertama sebagai partai politik terbanyak yang mengusung bukan kadernya. Disusul dengan **PDIP** dan partai **Hanura**

Banyaknya jumlah calon kepala daerah yang bukan kader partai politik pengusungnya, menandakan bahwa fungsi rekrutmen dan seleksi partai politik masih belum berjalan dengan baik. Dengan kata lain, hegemoni elit partai masih kental mewarnai pilkada 2020. Jika tidak disadari oleh masyarakat luas maka akan merugikan pemerintahan daerah di masa mendatang. Hal itu disebabkan kepala daerah terpilih terbebani untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan untuk membeli 'rekomendasi' dari partai tertentu/mahar politik

yang jumlahnya di angka tidak wajar. Wibawa partai politik akhirnya terperosok oleh kuasa uang yang mampu mengendalikan arah gerak partai.

#MembongkarDinastiPolitik

**PARTAI POLITIK YANG TIDAK MENGUSUNG
KADERNYA DALAM PILKADA 2020
BERDASARKAN JUMLAH DINASTI POLITIK**

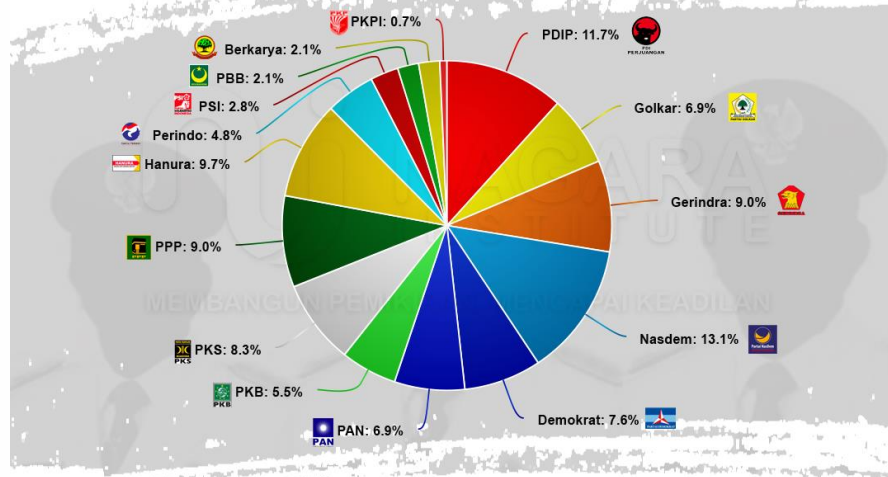


Diagram 11

IV. PENUTUP

Demokrasi selalu dihadapkan dengan tantangan serius seperti pihak-pihak yang menjadikan proses elektoral sebagai industri pertahanan kekuasaan dan kekayaan bagi kelompok-kelompok tertentu. Hasil riset Nagara Institute terhadap calon Kepala Daerah 2020 menunjukkan bahwa fungsi rekrutmen partai politik masih jauh dari harapan. Partai politik belum berhasil untuk menjadi laboratorium yang menyiapkan calon pimpinan daerah yang berbasis pada nilai-nilai partai politik. Pragmatisme partai politik masih ditunjukkan dengan merekrut orang-orang yang bukan kader aslinya. Akhirnya banyak terjadi pembelotan partisan oleh kader partai yang tidak setuju dengan kebijakan elite partai yang sangat sentralistik. UU Partai Politik belum mampu memberikan dorongan paksa agar partai politik melakukan demokratisasi internal partai dalam menjalankan fungsi rekrutmen.

Fungsi rekrutmen yang tidak berjalan baik akhirnya kian menyuburkan dinasti politik yang masih menjadi masalah dalam demokratisasi di tingkat lokal. Melihat perjalanan pilkada sejak tahun 2005, kepala daerah yang berasal dari dinasti politik mengalami peningkatan yang signifikan. Terlebih setelah Putusan MK 33/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa praktik dinasti politik adalah konstitusional. Putusan ini menegaskan realita dinasti politik yang tidak saja menjadi masalah demokrasi lokal

melainkan juga dalam dunia internasional. Destruksi dari praktik dinasti politik tidak hanya merusak sendi demokrasi melainkan juga menghambat terwujudnya *local good governance* dan mempengaruhi pembangunan ekonomi di tingkat lokal.

Model dinasti politik yang berkembang di Indonesia selama bertahun-tahun masih memiliki pola yang sama. Mulai dari dinasti politik yang mempertahankan kuasa dalam satu wilayah, dinasti politik yang meluaskan kekuasaan ke luar daerah dan lintas kekuasaan, hingga istri dari kepala daerah yang maju dalam pilkada dalam rangka melanggengkan/mempertahankan kebijakan suami terdahulu saat menjabat. Menjadikan istri sebagai sarana mempertahankan kekuasaan suami sebelumnya memberikan citra buruk bagi perempuan, khususnya mengenai isu partisipasi perempuan dalam pemerintahan, yang seharusnya perempuan berpartisipasi justru terjebak dalam eksploitasi.

Seluruh realita ini harus segera disadari karena jika tidak, demokrasi yang sudah dibangun susah payah akan hancur oleh pembiaran kita terhadap hasrat segelintir orang untuk berkuasa. Atas hal tersebut maka rekomendasi dari Nagara Institute adalah menutup pilihan terhadap calon kepala daerah yang terpapar dinasti politik. Dalam rangka perbaikan demokrasi di masa mendatang, para pembentuk undang-undang harus segera merevisi UU Partai Politik, khususnya mengenai kaderisasi partai politik yang mengharuskan seorang calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik telah beproses menjadi kader partai sekurang-kurangnya selama (5) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Brian C. Smith (1998). *Local government and the transition to democracy: a review article*.
- Carlos Velasco Rivera (2017). *Political Dynasties and Party Strength: Evidence from Victorian Britain*;
- Fitriyah (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada);
- Jeffrey A. Winters (2011). Oligarki.
- Hyden, Goran (1992). *Governance and The Study of Politics*;
- Larry Diamond (2003). *Developing Democracy: Toward Consolidation*;
- Richard Robison and Vedi R Hadiz (2004). *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market*;
- Richard S Katz. And William Crotty (Eds.) (2006), *Handbook of Party Politics*;
- Robert Endi Jaweng (2017). Korupsi dan Politik Dinasti;
- Siddharth Eapen George dan Dominic Ponattu (2018). *Like Father, Like Son? How Political Dynasties Affect Economic Development*.
- Susan Scarrow (2005). *Political Parties And Democracy In Theoretical And Practical Perspective*;
- Tadem, Teresa S Encarnacion and Eduardo C Tadem. (2016). *Political Dynasties in The Philippine : Persistent Patterns, Perennial Problems. South East Asia Research*;
- Wasisto Raharjo Djati (2012). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal;
- Yasushi Asako, Takeshi Iida, Tetsuya Matsubayashi dan Michiko Ueda (2012). *Dynastic Politicians: Theory and Evidence from Japan*.
- Yoes Kenawas (2020). *Dynastic Politics: Indonesia's new Normal*.

LAMPIRAN: RINCIAN DINASTI POLITIK DI SELURUH INDONESIA DALAM PILKADA 2020

Provinsi	No	NAMA	Calon Kepala/ wakil	DAERAH	JENIS HUBUNGAN KEKERABATAN/ DINASTI POLITIK	NAMA HUBUNGAN KEKERABATAN /DINASTI POLITIK	JABATAN PUBLIK / ELIT POLITIK	Petahana/ Tidak
SUMATRA								
BENGKULU (2)	1	WAWAN FERNANDES	WAKIL BUPATI	KAB. LEBONG	ANAK KANDUNG	Anak kandung dari mantan Walikota Bengkulu Achmad Rusli Periode 1990-1992	Iasaat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Lebong periode 2016-2021 atau petahana.	PETAHANA
	2	SUSILAWATI	BUPATI	KAB.REJANG LEBONG	ISTERI	isteri dari mantan Bupati Rejang Lebong dua periode 2006-2011 dan 2011-2016, Suherman	Ketua DPD Nasdem Rejang Lebong	BUKAN PETAHANA
SUMATRA UTARA (5)	1	WINDA FITRIKA	WAKIL BUPATI	KAB.ASAHAN	ISTERI	Istri Alm. Taufan Gama S, wakil bupati 2 periode sebelumnya	Tidak ada keterangan lebih jauh mengenai yang bersangkutan	BUKAN PETAHANA
	2	ADLIN TAMBUNAN	WAKIL BUPATI	KAB. SERDANG BEDAGAI	ANAK	anak dari Ansari Tambunan Bupati Kabupaten Deli Serdang .	anggora DPRD kota medan 2014-2019	BUKAN PETAHANA
	3	ANTON ACHMAD SARAGIH	BUPATI	KAB. SIMALUNGUN	KAKAK KANDUNG	kakak kandung JR saragih, Bupati Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatra Utara periode 2010-2015 dan periode 2016-2021.	komisaris di Badan Usaha Milik Negara Riset Perkebunan Nusantara	BUKAN PETAHANA
	4	LISA ANDRIANI LUBIS	WALIKOTA	KOTA BINJAI	ISTERI	Lisa Andriani Merupakan Isteri Dari Muhammad Idaham Walikota Binjai 2 Periode Yaitu 2010-2015 Dan 2016-2021	pengurus DPD IPK kota Binjai periode 2020-2025	BUKAN PETAHANA
	5	MUHAMMAD BOBBY NASUTION	WALIKOTA	KOTA MEDAN	MENANTU	merupakan menantu dari presiden republik indonesia jokowi dodo		BUKAN PETAHANA

SUMATRA BARAT (1)	1	HARIADI	BUPATI	Kab. AGAM	SUAMI	Suami dari Emma Yohanna merupakan anggota DPD RI sejak tahun 2009 sampai periode 2019-2024.	Ketua DPW PPP Sumatera Barat. Iamerupakan seorang pengusaha yang juga menjadi Wakil Ketua HIPMI Sumbar dan KADIN Sumbar.	BUKAN PETAHANA
SUMATRA SELATAN (4)	1	DEVI SUHARTONI	BUPATI	KAB. MUSIRAWAS UTARA	SUAMI	Merupakan suami dari anggota DPRD Musi Rawas Utara periode 2019-2024, Rita Suryani dari Fraksi PDIP	Iamerupakan Wakil Bupati Musi Rawas Utara saat ini periode 2016-2021	PETAHANA
	2	RUSLAN TAIMI	BUPATI	KAB. OKU TIMUR	ADIK IPAR	Merupakan Adik Ipar dari Herman Deru Gubernur Sumatera Selatan yang menjabat sejak 1 Oktober 2018 sekaligus ayah dari Percha Leanpuri Anggota Dewan Parlemen RI 3 Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II fraksi Partai Nasdem dan Ketua Umum PBI 2019-2024.	Iamerupakan Anggota TNI AD berpangkat Kolonel Inf yang saat ini menjabat sebagai Kepala bidang Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Sebelumnya ia pernah menjadi Kasdim 0403 membawahi wilayah OKU, OKU Timur, dan OKU Selatan pada tahun 2006-2010	BUKAN PETAHANA
	3	LANOSIN HAMZAH	BUPATI	KAB. OKU TIMUR	ADIK KANDUNG	Merupakan adik kandung dari Herman Deru Gubernur Sumatera Selatan yang menjabat sejak 1 Oktober 2018 sekaligus ayah dari Percha Leanpuri Anggota Dewan Parlemen RI 3 Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II fraksi Partai Nasdem dan Ketua Umum PBI 2019-2024.	Iamerupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten OKU Timur, ia menjabat	BUKAN PETAHANA
	4	ADI NUGRAHA PURNA YUDHA	WAKIL BUPATI	KAB. OKU TIMUR	ANAK KANDUNG	Merupakan Anak Kholid Mawardi Bupati Ogan Komering Ulu Timur periode 2016-2021. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur 2		BUKAN PETAHANA

						periode yakni 2005–2010 dan 2010–2015		
JAMBI (6)	1	YUNNINTA ASMARA	BUPATI	KAB. BATANGHARI	ISTERI	istri dari Bupati Batanghari saat ini, Syahirsyah SY periode kedua yakni 2016-2021	Imerupakan anggota DPRD Batanghari Periode 2014-2019 dan 2019-2024	BUKAN PETAHANA
	2	MUHAMMAD FIRDAUS FATTAH	BUPATI	KAB. BATANGHARI	KAKAK KANDUNG, ANAK KANDUNG, & KAKAK IPAR	Kakak dari Hafiz Fattah yang sebelumnya mencalonkan diri tetapi gagal karena kasus hukum dan ketua DPD PAN Batanghari Anak dari Alm. Wakil Bupati Batanghari 2016-2020. Kakak Ipar dari Anita Yasmin (Isteri Hafiz Fattah) Ketua DPRD Batanghari 2019-2024		BUKAN PETAHANA
	3	CAMELIA PUJI ASTUTI	WAKIL BUPATI	KAB. BATANGHARI	ANAK KANDUNG	Anak dari H. Hasip Kalimuddin Syam, Bupati Batanghari pada tahun 1980 hingga 1991, dan juga Wakil Gubernur Jambi 1999-2004	Anggota DPRD Batanghari 2019-2024	BUKAN PETAHANA
	4	FIKAR AZAMI	WALIKOTA	KOTA SUNGAI PENUH	ANAK KANDUNG	Anak Kandung DARI ASFRI JAYA BAKRI Wali Kota Sungaipenuh periode 2011—2016 dan 2016—2021		BUKAN PETAHANA
	5	MULYANI SIREGAR	BUPATI	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	ADIK KANDUNG	Adik kandung dari Bupati Tanjung Jabung Barat yang saat ini menjabat, Safrial Bupati Tanjung Jabung Barat periode 2006-2011 dan 2016-2021	Imerupakan Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2019-2024	BUKAN PETAHANA
	6	RATU MUNAWAROH	WAKIL GUBERNUR	PROVINSI JAMBI	ISTERI/IBU TIRI	Isteri dari ZULKIFLI NURDIN mantan Gubernur Jambi periode 1999-2004 dan 2005-2010. Ibu Tiri dari Zumi Zola Bupati Tanjung Jabung Timur 2011-2015 dan Gubernur Jambi 2016-2018	Pernah menjadi anggota DPR RI periode 2010-2014	BUKAN PETAHANA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (3)	1	ADITYA RIZKI	BUPATI	KAB. BANGKA SELATAN	ANAK KANDUNG	Merupakan anak dari Bupati Bangka Selatan saat ini atau periode 2016-2021 yaitu Justiar Noer	Iasata ini merupakan Anggota DPRD Kepulauan Bangka Belitung periode 2019-2024	BUKAN PETAHANA
	2	DEBBY VITA DEWI	WAKIL BUPATI	KAB. BANGKA SELATAN	ISTERI	Merupakan istri dari Bupati Bangka Selatan periode 2010-2015 yaitu H. Jamro	Tidak ada keterangan lebih jauh dari yang bersangkutan	BUKAN PETAHANA

	3	CALON BUPATI YURI KEMAL	BUPATI	KAB . BELITUNG TIMUR	ANAK KANDUNG	Merupakan anak dari Mantan Menteri Sekretaris Negara 2004-2007 dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang yaitu Yusril Ihza Mahendra, atau merupakan ponakan dari Bupati Belitung Timur saat ini yaitu Yuslih Ihza Mahendra	Iam merupakan seorang pengacara yang saat ini menjadi Wakil Direktur Ihza & Ihza Law Firm	BUKAN PETAHANA
KEPULAUAN RIAU (5)	1	ROBY KURNIAWAN	WAKIL BUPATI	KAB. BINTAN	ANAK KANDUNG	anak dari H. Ansar Ahmad, S.E., M.M. Bupati Bintan periode 10 Agustus 2005 hingga 10 Agustus 2015.	Bidang hubungan luar negeri DPP partai Golkar dan sekarang (2020-2024) Roby dipercaya masuk didalam departemen bidang industri DPP PARTAI golkar	BUKAN PETAHANA
	2	ALIAS WELLO	BUPATI	KAB. BINTAN	AYAH	Anaknya yang bernama Neko Wesha Pawelloy dan Alpio Diaz Pawelloy merupakan Anggot DPRD Lingga periode 2019-2024	Direktur PT. Aries Iron Mining (2011-) Chairman CAMALAY FOODS Co.Ltd Cambodia Authorized Representatif Indonesia (2012-) Bupati Lingga (2016-2021	PETAHANA
	3	NEKO WESHA PAWELLOY	WAKIL BUPATI	KAB. LINGGA	ANAK KANDUNG & KAKAK	Adiknya Alpio Diaz Pawelloy merupakan Anggota DPRD Lingga periode 2019-2024 dan Ayahnya merupakan Bupati Lingga Periode 2016-2021 Alias Wello	Iasaat ini merupakan Anggota DPRD Lingga periode 2019-2024	BUKAN PETAHANA
	4	ISDIANTO	GUBERNUR	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	ADIK KANDUNG	Isdianto merupakan adik kandung mantan gubernur Muhammad Sani.	Wakil Gubernur Kepulauan Riau [1] (27 Maret 2018-12 Juli 2019) Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Kepulauan Riau [2] 12 Juli 2019-sekarang	PETAHANA
	5	MERLIN AGUSTIN	WAKIL GUBERNUR	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	ISTERI	Suami marlina adalah Muhammad Rudi Wali Kota Batam periode 2016-2021. Rudi pernah menjabat sebagai Wakil		BUKAN PETAHANA

						Wali Kota Batam periode 2011-2016. Sebelum terjun ke politik, ia merupakan anggota Polri yang mengundurkan diri pada 2004		
LAMPUNG (4)	1	ARDITO WIJAYA	WAKIL BUPATI	KAB. LAMPUNG TENGAH	ANAK KANDUNG	Ia adalah anak dari Walikota Metro periode 2016-2021 yang juga mantan Bupati Lampung Tengah 2011-2016 yaitu Achmad Pairin	Ia merupakan seorang dokter yang juga Pegawai Negeri Sipil, ia bertugas di Puskesmas Seputihmata Lampung Tengah	BUKAN PETAHANA
	2	NESSY KALVIA	BUPATI	KAB. LAMPUNG TENGAH	ISTERI	Merupakan istri dari mantan Bupati Lampung Tengah 2016-2018 yaitu Mustafa	Tidak ada keterangan	BUKAN PETAHANA
	3	RINA MARLINA	WAKIL BUPATI	KAB. WAY KANAN	ISTERI	Ia merupakan istri dari Senator/Anggota DPD-RI Bustami Zainudin yang juga pernah menjadi Wakil Bupati Way Kanan periode 2006-2011 dan Bupati Way Kanan periode 2011-2016	Ia merupakan seorang pengajar yang juga aktif dalam berbagai organisasi keagamaan. Ia tercatat sebagai Sekretaris Gerakan Nasional Anti Narkoba MUI sejak 2015 hingga sekarang, ia juga merupakan penasihat ICMI Way Kanan dan Muslimat NU Way Kanan. Ia juga tercatat pernah menjadi dosen di Universitas Esa Unggu (2017), Universitas Bandar Lampung (2011-2015), dan juga Universitas Mercubuana (2001-Sekarang)	BUKAN PETAHANA
	4	EVA DWIANA	WALIKOTA	KOTA BANDAR LAMPUNG	ISTERI	Eva merupakan istri dari herman hasanusi yang merupakan walikota bandar lampung 2 periode 2010-2015 dan 2016-2021	anggota DPRD lampung.	BUKAN PETAHANA
RIAU (3)	1	REZITA MEYLANI YOPI	BUPATI	KAB. INDRAGIRI HULU	ISTERI	Isteri dari Bupati Indragiri Hulu 2010-2015 dan 2016-2021	Ia merupakan Ketua TP PKK Indragiri Hulu, ia juga	BUKAN PETAHANA

							aktif dalam berbagai kegiatan sosial	
	2	ADI SUKEMI	BUPATI	KAB. PELALAWAN	ANAK KANDUNG	Adi Sukemi adalah anak dari Muhammad Haris Kabupaten Pelalawan dan juga seorang politisi senior di Riau. Saat ini adalah bupati Pelalawan dua periode dan saat ini menjabat untuk periode 2016-2021 Muhammad Harris juga pernah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan juga seorang kader Golkar	Iamerupakan Ketua DPRD Pelalawan periode 2019-2024 dari Partai Golkar. Ia juga menjadi Ketua DPD KNPI Pelalawan	BUKAN PETAHANA
	3	HAMULIAN	BUPATI	KAB. ROKAN HULU	SUAMI	Merupakan Suami dari anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Hasmeri Yulinawati dari Fraksi Partai Golkar	Iamerupakan seorang pengusaha dan putra daerah Kabupaten Rokan Hulu	BUKAN PETAHANA
JAWA DAN BALI								
BANTEN (8)	1	IRNA NAURLITA	BUPATI	KAB. PANDEGLANG	ISTERI	Isteri dari mantan Bupati Pandeglang dua periode (2000-2009) yaitu Dimiyati Natakusumah	Iamerupakan Bupati Pandeglang saat ini periode 2016-2021 atau petahana. Ia pernah menjadi Anggota DPR-RI pada 2014-2016 melalui PPP	PETAHANA
	2	TANTO WARSONO ARBAN	WAKIL BUPATI	KAB. PANDEGLANG	MENANTU	Menantu dari mantan Gubernur Banten 2007-2014 yaitu Ratu Atut Chosiyah	Iamerupakan Wakil Bupati Pandeglang saat ini periode 2016-2021 atau petahana. Ia pernah menjadi Ketua Komis III DPRD Banten tahun 2014-2016 melalu Golkar	PETAHANA
	3	EKI BAIHAQI	WAKIL BUPATI	KAB. SERANG	ANAK KANDUNG	anak kandung dari Bupati Serang dua periode 2005-2015 yaitu Taufik Nuriman	Ia merupakan seorang pengusaha dan tokoh muda Serang. Ia aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan dan lainnya, tercatat ia pernah menjadi	BUKAN PETAHANAN

							Ketua KONI Kabupaten Serang 2014-2019 dan Ketua Perbankin Banten 2019-2023	
4	RATU TATU CHASANAH	BUPATI	KAB. SERANG	ADIK KANDUNG	adik kandung dari Gubernur Banten dua periode 2007-2014 yaitu Ratu Atut Chosiyah		Iamerupakan Bupati Serang saat ini periode 2016-2021 atau petahana. Pada periode 2010-2015 ia merupakan Wakil Bupati Serang	PETAHANA
5	RATU ATI MARLIYATI	WALIKOTA	KOTA CILEGON	ANAK KANDUNG & ADIK KANDUNG	Anak dari Tb Aat Syafa'at mantan Wali Kota Cilegon tahun 2000-2005 dan 2005-2010. 2.Adik dari Tb Iman Ariyadi sebagai wali kota Cilegon 2010-2015 dan 2016-2021		Wakil Wali Kota Cilegon Periode 2016-2021.	PETAHANA
6	RAHAYU SARASWATI DJOJHADIKUSUMO	WAKIL WALIKOTA	KOTA TANGERANG SELATAN	ANAK KANDUNG & KEPONAKAN	Keponakan dari Prabowo Subianto Ketua Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Republik Indonesia		Iamerupakan mantan anggota DPR RI periode 2014-2019. Rahayu juga merupakan seorang aktivis, politikus, aktris, presenter. Latar belakang pendidikanya yaitu akting di London, Inggris	BUKAN PETAHANA
7	SITI NUR AZIZAH	WALIKOTA	KOTA TANGERANG SELATAN	ANAK KANDUNG	Anak dari K.H. Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024		Ia juga mengajar sebagai Dosen STAI Salahudin Al Ayubi Jakarta Utara sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang. Ia pernah bekerja sebagai PNS di Kementerian Agama RI tahun 2004-2019. Latar belakang pendidikannya adalah S3 Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana (tahun 2017) S2 Ilmu Hukum	BUKAN PETAHANA

							Universitas Jayabaya (tahun 2005) S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Malang (tahun 1995)	
	8	PILAR SAGA ICHSAN	WAKIL WALIKOTA	KOTA TANGERANG SELATAN	ANAK KANDUNG & SEPUPU	Anak dari Ratu Tatu Chasanah yang menjabat sebagai Bupati Serang 2016-2021. Sepupu dari Andika Hazrumy Wakil Gubernur Banten	bendahara Umum DPP Mahasiswa Pancasila dan Ketua Harian DPP Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia	BUKAN PETAHANA
JAWA BARAT (3)	1	KURNIA AGUSTINA	BUPATI	KAB. BANDUNG	ISTERI	istri dari Dadang Naser Bupati Bandung saat ini periode 2016-2021 dan 2011-2016	Iamerupakan Ketua TP PKK Kabupaten Bandung sejak 2011 hingga saat ini.	BUKAN PETAHANA
	2	Daniel Mutaqien	BUPATI	KAB. Indramayu	ANAK KANDUNG	Merupakan anak dari Mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syaifuddin 2000-2010 dan Anna Sophana Bupati Indramayu 2010-2018	Iamerupakan Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dan 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar	BUKAN PETAHANA
	3	Ratnawati	WAKIL BUPATI	KAB. Indramayu	ISTERI	Merupakan Istri dari Herman Khaeron Anggota DPR-RI periode 2019-2024 Fraksi Demokrat	Iamerupakan seorang yang juga Aperatur Sipl Negara yang bekerja di Puskesmas	BUKAN PETAHANA
JAWA TENGAH (10)	1	Umi Kulsum	BUPATI	KAB. BLORA	ISTERI	isteri dari Bupati Djoko Nugroho periode periode 2010-2015 dan 2016-2021	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora	BUKAN PETAHANA
	2	Ristawati Purwaningsih	WAKIL BUPATI	KAB. KEBUMEN	ISTERI	Isteri dari Cipto Waluyo Mantan Ketua DPRD Kebumen periode 2014-2019 namun ditengah masa jabatannya, ia terjerat oleh kasus korupsi.	Iamerupakan kader dari PDIP. Iajuga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPC PDIP Kebumen	BUKAN PETAHANA
	3	Sri Mulyani	BUPATI	KAB. KLATEN	ISTERI	isteri dari Sunarna yang pernah menjabat bupati Klaten selama dua periode yakni 2005-2010 dan 2010-2015. Sunarna juga saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI	Saat ini Iamenjabat sebagai seorang bupati Klaten periode 2017-2021. Menariknya Sri	PETAHANA

						Fraksi PDIP Komisi IV Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan Periode 2019-2024	Mulyani sebelumnya adalah seorang wakil bupati Klaten periode 2016-2021. Namun, Karena bupati Sri Hartini menjadi tersangka kasus korupsi sehingga Iadilantik menjadi bupati Klaten.	
	4	Zaini Makarim Supriyatno	WAKIL BUPATI	KAB. PURBALINGGA	ADIK IPAR	Adik Ipar Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah		BUKAN PETAHANA
	5	Dyah Hayuning Pratiwi	BUPATI	KAB. PURBALINGGA	ANAK KANDUNG & KAKAK KANDUNG	Anak dari Triyono Budi Sasongko Bupati Purbalingga Periode 2000-2005 dan 2005-2010 dan Plt Gubernur Kalimantan Utara sejak 22 April 2015 - 12 Februari 2016. 2. Kakak dari Dyah Handayani Nastiti menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyumas periode 2014-2019 .	Wakil Bupati Purbalingga Periode 2016 - 2021. Lulus dari SMA Negeri 8 Jakarta, pada 2005 ia melanjutkan pendidikan Sarjana Ilmu Ekonomi Kelas Internasional, Universitas Indonesia. Diwisuda pada 2010, Tiwi selanjutnya mendapat gelar Bachelor of Economics with Major In International Trade and Finance, The University of Queensland Australia.	PETAHANA
	6	Mochamad Hanies	WAKIL BUPATI	KAB. REMBANG	ADIK KANDUNG	Merupakan adik dari Anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PKB	Iamerupakan tokoh muda Rembang yang pernah	BUKAN PETAHANA

							menjadi Ketua GP Ansor Rembang	
	7	Bintang Narsasi	BUPATI	KAB. SEMARANG	ISTERI & IBU	1. Isteri dari Bupati Semarang H. Mundjirin periode 2015-2020. 2. Ibu dari Anggota DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024 yaitu Biena Munawa Hatta dari partai PDIP.	Iamerupakan Ketua PMI Kabupaten Semarang dan juga ketua penggerak PKK Kabupaten Semarang	BUKAN PETAHANA
	8	Etik Suryani	BUPATI	KAB. SUKOHARJO	ISTERI	Isteri dari Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya 2016-2021 yang saat ini masih aktif menjabat	Ketua Tim Penggerak PKK Sukoharjo	BUKAN PETAHANA
	9	HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU	WAKIL WALIKOTA	KOTA SEMARANG	ISTERI	Isteri dari Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah periode 2019-2024 Fraksi PDIP Alwin Basri.	Wakil Wali Kota Semarang periode 2016-2021. Iamenyelesaikan pendidikan magisternya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang	PETAHANA
	10	GIBRAN RAKABUMING RAKA	WALIKOTA	KOTA SURAKARTA	ANAK KANDUNG	Anak Presiden Republik Indonesia Jokowi	Pengusaha. Gibran lulus dari Management Development Institute of Singapore (MDIS) dan melanjutkan studinya ke program Insearch di University of Technology Sydney (UTS Insearch), Sydney, Australia hingga lulus pada tahun 2010. Ia menjabat sebagai ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJBI) Kota Solo.	BUKAN PETAHANA
JAWA TIMUR (9)	1	Ipuk Fiestiandani	BUPATI	KAB. BANYUWANGI	ISTERI	isteri dari bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas periode 2016-2021.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi	BUKAN PETAHANA
	2	MARHEINIS URIP WIDODO	WAKIL BUPATI	KAB. BLITAR	SUAMI	Dua isterinya Halla Unariyanti (48 tahun) istri pertama wabup, terpilih kembali menjadi Kepala Desa Bendosewu.	Wakil Bupati Blitar	PETAHANA

						Sedangkan istri kedua, Fendriana Anitasari (33 tahun), terpilih menjadi kepala desa di Desa Wonorejo.		
3	Hanindhito Himawan	BUPATI	KAB. KEDIRI	ANAK KANDUNG		Putra Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung yang juga mantan Sekjen DPP PDIP		BUKAN PETAHANA
4	Indrata Nur Bayu Aji	BUPATI	KAB. PACITAN	PONAKAN		Keponakan Dari Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014	Ketua DPRD Pacitan	BUKAN PETAHANA
5	Ipong Muchlissoni	BUPATI	KAB. PONOROGO	SUAMI		Merupakan SUAMI dari Sri Wahyuni Anggota DPR RI periode 2019-2024 Fraksi Partai Nasdem	Iamerupakan Bupati Ponorogo saat ini periode 2016-2021 atau petahana.	PETAHANA
6	Achmad Fauzi	BUPATI	KAB. SUMENEP	KEPONAKAN		Keponakan kandung dari Said Abdullah, tokoh politik nasional (Anggota DPR RI) Fraksi PDIP. Peran Said Abdullah pada kemenangan pejabat sebelumnya 2014 – 2019 (Busro Karim dan Achmad Fauzi). Sumber : Warga Jawa Timur	Wakil Bupati Sumenep Periode 2016-2021	PETAHANA
7	Aditya Halindra Faridzki	BUPATI	KAB. TUBAN	ANAK KANDUNG		Anak mantan Bupati Tuban Haeny Relawati RW saat ini menjadi anggota DPR RI 2019-2024	anggota DPRD Jatim periode 2019-2024	BUKAN PETAHANA
8	HENRY PRADIPTA	WALIKOTA	KOTA BLITAR	ANAK KANDUNG		Anak dari Samanhudi Anwar Wali Kota Blitar yang menjabat periode 2016-2021	Wakil Bendahara DPC PDI-P Surakarta periode 2000-2005 dan Sekretaris DPC PDIP Surakarta dari 2005 hingga sekarang.	BUKAN PETAHANA
9	AJI SETYAWAN	WALIKOTA	KOTA MAGELANG	ANAK KANDUNG		Aji merupakan anak sulung Wali Kota Magelang saat ini, Sigit Widyonindito menjabat pada periode 2010-2015 dan 2016-2021. Ia adalah mantan kepala dinas pekerjaan umum Kota Magelang, ketua Asosiasi Pengusaha Kontraktor Magelang dan bendahara KONI Magelang	Anggota DPRD Kota Magelang 2019-2024	BUKAN PETAHANA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (2)	1	MAHMUD ARDI WIDANTO	WAKIL BUPATI	KAB. GUNUNG KIDUL	ANAK KANDUNG	Ardi sendiri memang berasal dari keluarga politisi. Ayahnya Totok Daryanto merupakan salah seorang pejabat teras di DPP PAN sekaligus mantan anggota DPR RI selama 3 periode.	Ketua DPD PAN Bantul. Ia juga sempat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Bantul periode 2014-2019.	BUKAN PETAHANA
	2	SRI KUSTINI	BUPATI	KAB. SLEMAN	ISTERI	isteri dari Bupati Sleman Sri Purnomo bupati Sleman yang menjabat pada periode 2010-2015 dan 2016-2021, dan Wakil Bupati Sleman periode 2005-2010	Ketua Tim Penggerak PKK Sleman	BUKAN PETAHANA
BALI DAN NUSA TENGGARA								
BALI (2)	1	I Nyoman Giri Prasta	BUPATI	KAB. BADUNG	AYAH	Anaknya, Made Bima Nata terpilih sebagai Ketua PAC PDIP Petang selama periode 2020-2024.	Bupati Badung 2016-2021	PETAHANA
	2	CALON WALIKOTA GEDE NGURAH AMBARA PUTRA	WALIKOTA	KAB. DENPASAR	ADIK KANDUNG	Kakak Gede Ngurah Ambara menjabat sebagai Anggota DPR RI Fraksi PDIP dua periode 2009-2014 dan 2014-2019.	Ia adalah seorang pengusaha, dan praktisi ekonomi	BUKAN PETAHANA
NTB (6)	1	Indah Dhamayanti	BUPATI	KAB. BIMA	ISTERI & IBU KANDUNG	Ia menjadi Bupati perempuan pertama di Nusa Tenggara Barat sekaligus merupakan Istri dari (Alm.) H. Ferry Zulkarnain mantan Bupati Bima dua periode (2005-2010) dan (2010-2015) dan Ibu kandung Muhammad Putera Ferryandi Ketua DPRD Kabupaten Bima Fraksi Golkar. Sumber: Warga Bima	Bupati Kabupaten Bima yang menjabat sejak tanggal 17 Februari 2016 .	PETAHANA
	2	Hj Eri Aryani Abubakar	BUPATI	KAB. DOMPU	ISTERI	istri Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin Periode 2010-2015 dan 2016-2021		BUKAN PETAHANA
	3	Dewi Noviany	WAKIL BUPATI	KAB. SUMBAWA	ADIK KANDUNG	Dewi Noviany merupakan adik dari Gubernur NTB Zulkieflimansyah.	Guru SMA Negeri 1 Sumbawa Besar, yang kemudian mendapat promosi jabatan dari Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah (kakak kandungnya), sebagai salah satu Kepala Bidang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset	BUKAN PETAHANA

							Daerah Provinsi NTB (Sumber warga NTB)	
	4	BADRUTTAMAM AHDA	WAKIL WALIKOTA	KOTA MATARAM	ANAK KANDUNG	Ia adalah anak kandung dari Ahyar Abduh yaitu Wali Kota Mataram periode 2010-2015 dan 2016-2021. Sebelum menjadi pejabat publik, pria yang akrab dipanggil Abduh ini memiliki karier sebagai Ketua DPRD Kota Mataram 2004- 2005.	Alumnus Universitas Al Azhar Kairo Mesir	BUKAN PETAHANA
	5	BAIHAQI	WALIKOTA	KOTA MATARAM	MENANTU	menantu Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH. MH.	Pengusaha dibidang kontraktor. Iamerupakan mantan Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kota Mataram	BUKAN PETAHANA
	6	PUTU SELLY ANDAYANI	WALIKOTA	KOTA MATARAM	ISTERI	SUAMI PUTU SELLY ADALAH RACHMAT HIDAYAT KETUA DPD PDIP NTB YANG JUGA MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA FRAKSI PDIP NTB DPR-RI	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB 2020	BUKAN PETAHANA
NTT (2)	1	Orient P. Riwu Kore	BUPATI	KAB. SABU RIJUA	ADIK KANDUNG	Orient Patriot Riwu Kore merupakan adik kandung Jefri Riwu Kore, Wali Kota Kupang periode 2017—2022.		BUKAN PETAHANA
	2	Kristiana Muki	BUPATI	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	ISTERI	istri Bupati TTU dua periode, Raymundus Sau Fernandes. Periode 2010-2015 & 2016-2021	anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem	BUKAN PETAHANA
KALIMANTAN								
KALIMANTAN UTARA (3)	1	Hj. Asmin Laura Hafid	BUPATI	KAB. NUNUKAN	ANAK KANDUNG	Sang ibu Hj Rahma Leppa menjabat sebagai Ketua DPRD Nunukan periode 2019-2024	1. bupati Nunukan periode 2016 hingga 2021 2. anggota DPRD Kalimantan Timur/Utara periode 2009-2014	PETAHANA
	2	UMI SUHARTINI	BUPATI	KAB. TANA TIDUNG	ISTERI	Suaminya adalah Undunsyah Bupati Tana Tidung pertama periode 2010-2015 dan 2016-2021. Ia ditetapkan sebagai bupati Tana Tidung terpilih untuk masa jabatan 2010-2015 oleh KPU Tana Tidung pada tanggal 30 Desember 2009 2009 setelah	Ketua PKK KTT	BUKAN PETAHANA

						memenangkan Pilkada Tana Tidung 2009.		
	3	UDIN HIANGGIO	GUBERNUR	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	AYAH-ANAK	Menariknya anak layaitu Sofyan Udin Hianggio merupakan anggota DPRD Tarakan 2019-2024		BUKAN PETAHANA
KALIMANTAN BARAT (2)	1	Henny Dwi Rini	BUPATI	KAB. MELAWI	ISTERI	istri Almarhum H. Firman Muntaco mantan Bupati Melawi periode 2010-2015.	Iamerupakan mantan Anggota DPRD Kalimantan Barat periode 2014-2019 dari Partai Golkar	BUKAN PETAHANA
	2	RUBAETY ERLITA	WAKIL BUPATI	KAB. SAMBAS	ISTERI	Isteri Dari Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Ir H Prabasa Anantatur, yang juga sekretaris DPW Golkar Kalimantan Barat	Iamerupakan mantan Senator atau Anggota DPD-RI dari Kalimantan Barat periode 2009-2014 dan 2014-2019	BUKAN PETAHANA
KALIMANTAN SELATAN (2)	1	SYAFRUDDIN H MAMING	BUPATI	KAB. TANAH BUMBU	ADIK KANDUNG	Adik kandung dari mardani H maming menjabat sebagai bupati tanah Tumbu tahun 2016-2018	ANGGOTA DPR RI 2019-2024	BUKAN PETAHAN
	2	MUHIDIN	WAKIL GUBERNUR	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	AYAH MERTUA	Mertua dari Harry Wijaya Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk periode 2019-2024		BUKAN PETAHANA
KALIMANTAN TENGAH (1)	1	IRAWATI	WAKIL BUPATI	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	ADIK KANDUNG	adik kandung dari Supian Hadi Bupati Kotawaringin Timur yang menjabat saat ini untuk masa periode 2010-2015 dan 2016-2021.	Irawati merupakan politisi PDIP yang kini menjadi anggota DPRD Provinsi Kalteng 2019-2024	BUKAN PETAHANA
KALIMANTAN TIMUR (4)	1	SERI MARAWIAH	BUPATI	KAB. BERAU	ISTERI	Suaminya merupakan ketua DPRD Kalimantan Timur Makmur HAPK		BUKAN PETAHANA
	2	MAHYUNADI	BUPATI	KAB. KUTAI TIMUR	ADIK KANDUNG	Adik Kandung Mahyudin (Wakil Ketua MPR RI) yang pada Pemilu 2019 lolos duduk di DPD RI, serta dua adiknya, Marsidik dan Maswar yang sama-sama duduk di DPRD Kutim.	Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur (2015-Sekarang)	BUKAN PETAHANA
	3	RAHMAD MASUD	WALIKOTA	KOTA BALIKPAPAN	KAKAK KANDUNG & ADIK KANDUNG	Kakak dari ABDUL GAFUR MAS'UD Bupati muda Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2018-2023. 2. Kakak dari Rudi Mas'ud, S.E adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	KETUA DPD II PARTAI GOLKAR BALIKPAPAN	BUKAN PETAHANA

	4	ENI MOERNIAENI	WALIKOTA	KOTA BONTANG	IBU	(DPR RI) periode 2019-2024 dapil Kalimantan Timur. 3. Adik dari Hasanuddin Mas'ud menjadi anggota DPRD Balikpapan tahun 2019-2024 Andi Faizal Hasdam, anak kedua menjadi anggota DPRD kota Botang priode 2019-2024	WALIKOTA BONTANG 2015-202	PETHANA
MALUKU DAN SULAWESI								
MALUKU (1)	1	Safitri Malik Soulissa	BUPATI	KAB. BURU SELATAN	ISTERI	Isteri Bupati Buru Selatan Tagop Sundarsono SOULISA 2016-2019	1. mantan anggota DPRD Maluku	BUKAN PETAHANA
MALUKU UTARA (3)	1	Hasan Ali Bassam	WAKIL BUPATI	KAB. HALMAHERA SELATAN	ANAK KANDUNG	Hasan Ali Bassam Kasuba Putra dari Dr. H. Muhammad Kasuba Bupati Halmahera Selatan (2010-2015)	1. calon Anggota DPRD provinsi Maluku Utara 2019	BUKAN PETAHANA
	2	Fifian Adeningsi	BUPATI	KAB. KEPUALAUAN SULA	ADIK KANDUNG	Adik kandung ahmad hidayat mus mantan bupati kabupaten kepulauan sula, periode 2005-2010 dan 2010-2015. Saudaranya nur ain mus juga anggota dprd pulau taliabu 2019-2024. Dan makmurdin mus anggota dprd kota makassar	1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Taliabu	BUKAN PETAHANA
	3	MUHAMMAD HASAN BAY	WALIKOTA	KOTA TERNATE	SEPUPU	Sepupu dari walikota ternate 2 periode 2010-2015 dan 2016-2021	anggota DPRD Kota Ternate	BUKAN PETAHANA
GORONTALO (1)	1	Saiful Mbuinga	BUPATI	KAB. POHUWATO	KAKAK KANDUNG	KAKAK DARI SYARIF MBUINGA politisi asal Gorontalo yang pernah menjabat Bupati Pohuwato periode 2010-2015 dan 2016-2021		BUKAN PETAHANA
SULAWESI BARAT (5)	1	Aris Munandar Kalma	WAKIL BUPATI	KAB. MAJENE	ANAK KANDUNG	ayahnya mantan bupati majene Kalma Katta 2 priode 2006-2016 serta ketua DPC majene dari PDIP		BUKAN PETAHANA
	2	Aras Tamauni	BUPATI	KAB. MAMUJU TENGAH	AYAH KANDUNG & MERTUA	Anaknya amalia fitri aras merupakan anggota dprd provinsi sulbar dapil sulbar 6 kabupaten mateng fraksi partai demokrat. Selain itu arsal aras anak dari aras tamauni merupakan ketua dprd kabupaten Mamuju Periode 2019-2024. Arwan Aras juga merupakan anggota	Ketua DPD I Partai Golongan Karya (GOLKAR)	BUKAN PETAHANA

						DPR-RI Fraksi PDIP 2019-2024. Dan Nirmalasari Aras yang merupakan anggota DPRD Mateng. Suami dari Nirmalasari yaitu Irwan Satya Putra Pababari, bupati Mamuju periode 2016-2019		
	3	Yaumil Ambo Djiwa	BUPATI	KAB. PASANGKAYU	KAKA KANDUNG	kakak dari agus ambo djiwa ketua pdip sulbar yang juga Bupati Pasangkayu periode 2010-2015 dan 2016-2021	anggota dan salah satu inisiator KAPKP	BUKAN PETAHANA
	4	HERNY	WAKIL BUPATI	KAB. PASANGKAYU	ISTERI	isteri dari agus ambo djiwa ketua pdip sulbar yang juga bupati pasangkayu periode 2010-2015 dan 2016-2021		BUKAN PETAHANA
	5	PATMAWATI FAHMI	BUPATI	KAB. MAJENE	ISTERI	Isteri dari Bupati Majene Fahmi Massiara		BUKAN PETAHANA
SULAWESI SELATAN (12)	1	MUNAFRI ARIFUDDIN	WALIKOTA	KOTA MAKASSAR	KEPONAKAN	Keponakan mantan wakil presiden republik indonesia jusuf kalla 2004-2009 dan 2014-2019	CEO PSM MAKASSAR	BUKAN PETAHANA
	2	ILHAM NAJAMUDDIN	WAKIL BUPATI	KAB. MAROS	ANAK KANDUNG	Ayahnya Andi Najamuddin, mantan bupati maros 2 priode 1999-2000	Staff Ahli Bidang Sosial Hukum dan Politik Pemerintah Kabupaten Maros	BUKAN PETAHANA
	3	ILHAM ZAINUDDIN	BUPATI	KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SAUDARA IPAR	saudara ipar dari bupati Syamsuddin Hamid yang sedang menjabat saat ini sebagai bupati pangkep	Ketua DPRD PANGKEP	BUKAN PETAHANA
	4	Rismayani	WAKIL BUPATI	KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	ISTERI	istri dari bupati Syamsuddin Hamid yang sedang menjabat saat ini sebagai bupati pangkep		BUKAN PETAHANA
	5	MUHAMMAD YUSRAN LOLOGAU	BUPATI	KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	KEPONAKAN	Keponakan dari bupati Syamsuddin Hamid yang sedang menjabat saat ini sebagai bupati pangkep	Ketua DPRD Pangkep	BUKAN PETAHANA
	6	ANDI NIRAWATI	BUPATI	KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	ISTERI	Istri legislator DPR RI Kamrussamad PERIODE 2019-2024	1. anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024	BUKAN PETAHANA
	7	Lutfi Halide	WAKIL BUPATI	KAB. SOPPENG	BESAN	Besan dari Syahrul Yasin Limpo enteri Pertanian Indonesia ke-28	DPW PARTAI NASDEM SULSEL	BUKAN PETAHANA
	8	Etha Rimba	WAKIL BUPATI	KAB. TORAJA UTARA	ISTERI	suaminya merupakan DPRD KALTIM HENRY P. TANDI PAYUNG.SE	Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bontang	BUKAN PETAHANA

	9	IRMAN YASIN LIMPO	WALIKOTA	KOTA MAKASSAR	ADIK KANDUNG	Kakak Irma Adalah Menteri Pertanian Saat Ini Syahrul Yasin Limpo		BUKAN PETAHANA
	10	ANDI ZUNNUN AMIN NURDIN	WAKIL WALIKOTA	KOTA MAKASSAR	ANAK KANDUNG	Anak Kandung Dari Nurdin Halid Politikus Golkar Pernah MENJABAT SEBAGAI Ketua Umum PSSI periode 2003—2011 dan pernah menjadi anggota DPR-RI dari Partai Golkar pada tahun 1999—2004		BUKAN PETAHANA
	11	ABDUL RAHMAN BANDO	WAKIL WALIKOTA	KOTA MAKASSAR	ADIK KANDUNG	Adik Kandung Bupati Enrekang Muslimin Bando 2018-2023	1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kota Makassar 2. pengusaha di sektor jasa perkebunan dan pertanian.	BUKAN PETAHANA
	12	FATMAWATI RUSDI	WAKIL WALIKOTA	KOTA MAKASSAR	ISTERI	Fatmawati merupakan isteri dari rusdi masse mappasessu merupakan anggota dpr ri periode 2019-2024. Dirinya pernah menjabat sebagai bupati kabupaten sidenreng rapping periode 2008-2013 dan 2013-2018	1. Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2. Direktur PT. Bayumas Jaya Mandiri 3. S1 Universitas Jayabaya 4. etua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidrap 5. Ketua Dewan Pembina Dharma Wanita Kabupaten Sidrap.	BUKAN PETAHANA
SULAWESI TENGAH (3)	1	HOLILIANA TUMIMOMOR	BUPATI	KAB. MOROWALI UTARA	ISTERI	Isteri dari Ir. Aptripel Tumimomor, M.T. Bupati Morowali Utara sejak tanggal 17 Februari 2016 hingga kematiannya pada tanggal 2 April 2020	1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Morowali Utara	BUKAN PETAHANA
	2	BESAR BANTILAN	WAKIL BUPATI	KAB. TOLI TOLI	ANAK KANDUNG	Besar Bantilan merupakan anak dari Mohammad Saleh Bantilan periode 2010-2015 dan 2016-2021.	1. DPD Pemuda Pancasila Tolitoli	BUKAN PETAHANA
	3	CALON WAKIL BUPATI MUH. FAISAL BANTILAN	WAKIL BUPATI	KAB. TOLI TOLI	ADIK KANDUNG	Adik kandung bupati Toli 2 periode sejak tahun 1999-2010. Iajuga wakil Ketua DPRD (tahun 2004-2009 sebagai Ketua DPRD)	ANGGOTA DPRD TOLI TOLI 2014-2019	BUKAN PETAHANA

SULAWESI TENGGARA (1)	1	Amrullah	BUPATI	KAB. KONAWE KEPULAUAN	AYAH	anaknya rizky menjadi anggota DPRD kota sulawesi tenggara	Ketua DPC Partai Demokrat Konkep	BUKAN PETAHANA
SULAWESI UTARA (11)	1	Amalia Ramadhan Landjar	BUPATI	KAB. BOLAANG MONGODOW TIMUR	ANAK KANDUNG	anak bupati saat ini sehan salim landjar Bupati Bolaang Mongondow Timur ke-2 dan ke-4. Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Utara periode 2016 - 2021		BUKAN PETAHANA
	2	Michaela Paruntu	BUPATI	KAB. MINAHASA SELATAN	ADIK KANDUNG	adik dari bupati Christiany Eugenia Paruntu bupati terpilih di Kabupaten Minahasa Selatan untuk periode 2010-2015 dan periode 2016-2021		BUKAN PETAHANA
	3	Shintia Gelly Rumumpe	BUPATI	KAB. MINAHASA UTARA	ANAK KANDUNG	ANAK Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan periode kedua sejak 17 Februari 2016 setelah ia terpilih dalam pemilihan umum Bupati Minahasa Utara 2015. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara periode pertama sejak 14 Agustus 2005 hingga April 2008.	wakil ketua DPRD Minahasa Utara	BUKAN PETAHANA
	4	MAURITS MANTIRI	WALIKOTA	KAB. BITUNG	AYAH	anaknya gerald mantiri menjabat sebagai anggota dprd kota bitung tahun 2019-2024	Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bitung Periode 2015-2020	BUKAN PETAHANA
	5	HENGKY HONANDAR	WAKIL WALIKOTA	KOTA BITUNG	KAKAK IPAR	adik ipar dari anggota dprd kota bitung periode 2019-2024 yakni lanny sondakh		BUKAN PETAHANA
	6	JULYETA PAULINA	WALIKOTA	KOTA MANADO	ISTERI	IAMERUPAKAN ISTERI DARI VEKY LUMENTUT WALIKOTA MANADO PERIODE 2010-2015 DAN 2016-2021		BUKAN PETAHANA
	7	JILLY G EMAN	WALIKOTA	KOTA TOMOHON	ANAK & KAKAK KANDUNG	ayahnya jimmy f eman merupakan walikota tomohon 2016-2021 sedangkan adiknya christo bless eman menjabat sebagai anggota prd tomohon 2019-2024	DPD II Partai Golkar Kota Tomohon	BUKAN PETAHANA
	8	OLLY DONDOKAMBEY	GUBERNUR	PROVINSI SULAWESI UTARA	KAKAK	dua saudara kandung Olly, Adriana Dondokambey dan Aaltje Dondokambey berhasil menduduki kursi di legislatif. Suara signifikan berhasil diraup keduanya yang sama-sama maju dari PDI Perjuangan. Adriana yang juga anggota	Olly merupakan Gubernur Sulawesi Utara yang menjabat sejak 12 Februari 2016	PETAHANA

						DPRD Sulut bertarung berebut kursi DPR RI.		
9	VONNIE PANAMBUNAN	GUBERNUR	PROVINSI SULAWESI UTARA	IBU & ADIK KANDUNG	Vonnie Merupakan Adik Dari Johny Panambunan Anggota Drpd Sulawesi Utara Periode 2019-2024. Disamping Itu Anaknya Daniel Mathew Rumumpe Merupakan Anggota Dprd Minahasa Utara Periode 2019-2024. Tidak Hanya Itu Anak Perempuannya Sintia Rumumpe Merupakan Anggota Dprd Minahasa Utara Periode 2019-2024.	Vonnie Merupakan Bupati Minahasa Utara periode kedua sejak 17 Februari 2016 setelah ia terpilih dalam pemilihan umum Bupati Minahasa Utara 2015. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara periode pertama sejak 14 Agustus 2005 hingga April 2008	PETAHANA	
10	CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU	GUBERNUR	PROVINSI SULAWESI UTARA	IBU	Ibu dari Adrian Jopie Paruntu Anggota DPR RI 2019-2024	BUPATI MINAHASA SELATAN 2016-2021	PETAHANA	
11	SEHAT SALIM LANDJAR	WAKIL GUBERNUR	PROVINSI SULAWESI UTARA	SUAMI & AYAH	Suami dari Nursiwin Dunggio yang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Amanat Nasional dan ayah dari Fuad Landjar Ketua DPRD Boltim periode 2019-2024	Bupati Bolaang Mongondow Timur 2016-2021	PETAHANA	